



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan mempertimbangkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu diganti;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL.**

**Pasal 1 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan standar harga satuan regional.
- (2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
  - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
  - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
  - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, standar harga satuan regional bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, standar harga satuan regional bersifat:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
  - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 2**

- (1) Standar harga satuan regional yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Standar harga satuan regional yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 3**

- (1) Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (2) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

**Pasal 5**

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan evaluasi penerapan standar harga satuan regional minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam melakukan evaluasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan standar harga satuan regional.

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2025

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2025

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRASETYO HADI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 105**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI  
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
  - a. Satuan biaya uang harian;
  - b. Satuan biaya uang representasi; dan
  - c. Satuan biaya penginapan.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**1. SATUAN BIAYA HONORARIUM**

Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

**1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah**

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

d. Pejabat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
  - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
  - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
  - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
  - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
  - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
  - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
  - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
  - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2) besaran . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

**1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

**1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa**

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

**1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa**

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

**Ketentuan:**

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

**1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa**

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

**1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**

**1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas**

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

2) dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
  - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- 1.4.2. Honorarium Moderator
- Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
  - b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara
- Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
- 1.4.4. Honorarium Panitia
- Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

**1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Jabatan                                              | Klasifikasi |    |     |
|----|------------------------------------------------------|-------------|----|-----|
|    |                                                      | I           | II | III |
| 1. | Pejabat Eselon I dan II                              | 2           | 3  | 4   |
| 2. | Pejabat Eselon III                                   | 3           | 4  | 5   |
| 3. | Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional | 5           | 6  | 7   |

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

b. Klasifikasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

**1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - 2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

**1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

**1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara**

**1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli**

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

**1.6.2. Honorarium Beracara**

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

**1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

**1.8. Honorarium Rohaniwan**

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

**1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website**

**1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal**

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

**1.9.2. Honorarium . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

**1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah**

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

**1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website***

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

*Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

**1.9.4. Honorarium Penulis Artikel**

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

**1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian**

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

**1.11. Honorarium . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota**

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

**1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**

**1.12.1. Honorarium Penceramah**

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

**1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara**

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

**1.12.3. Honorarium . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

**1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara**

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan**

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

**1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan**

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

c. jumlah: . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

**1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

**1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah**

**a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:**

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
  - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
  - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
  - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
  - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

**TABEL 1.1  
SATUAN BIAYA HONORARIUM**

| NO  | URAIAN                                                                                                                                             | SATUAN | BESARAN     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                | (3)    | (4)         |
| 1.1 | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH                                                                                              |        |             |
|     | 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran |        |             |
|     | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                                                                                                                 | OB     | Rp1.040.000 |
|     | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta                                                                                              | OB     | Rp1.250.000 |
|     | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta                                                                                              | OB     | Rp1.450.000 |
|     | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar                                                                                              | OB     | Rp1.660.000 |
|     | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar                                                                                            | OB     | Rp1.970.000 |
|     | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar                                                                                            | OB     | Rp2.280.000 |
|     | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar                                                                                             | OB     | Rp2.590.000 |
|     | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar                                                                                            | OB     | Rp3.010.000 |
|     | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar                                                                                            | OB     | Rp3.420.000 |
|     | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar                                                                                            | OB     | Rp3.840.000 |
|     | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar                                                                                           | OB     | Rp4.250.000 |
|     | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar                                                                                          | OB     | Rp4.770.000 |
|     | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar                                                                                          | OB     | Rp5.290.000 |

n. Nilai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

| NO  | URAIAN                                                       | SATUAN | BESARAN     |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| (1) | (2)                                                          | (3)    | (4)         |
|     | n. Nilai pagu dana di atas<br>Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OB     | Rp5.810.000 |
|     | o. Nilai pagu dana di atas<br>Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun | OB     | Rp6.330.000 |
|     | p. Nilai pagu dana di atas<br>Rp1 triliun                    | OB     | Rp7.370.000 |
|     |                                                              |        |             |
|     | 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan                     |        |             |
|     | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                           | OB     | Rp1.010.000 |
|     | b. Nilai pagu dana di atas<br>Rp100 juta s.d. Rp250 juta     | OB     | Rp1.210.000 |
|     | c. Nilai pagu dana di atas<br>Rp250 juta s.d. Rp500 juta     | OB     | Rp1.410.000 |
|     | d. Nilai pagu dana di atas<br>Rp500 juta s.d. Rp1 miliar     | OB     | Rp1.610.000 |
|     | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d.<br>Rp2,5 miliar   | OB     | Rp1.910.000 |
|     | f. Nilai pagu dana di atas<br>Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar   | OB     | Rp2.210.000 |
|     | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d.<br>Rp10 miliar    | OB     | Rp2.520.000 |
|     | h. Nilai pagu dana di atas<br>Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar   | OB     | Rp2.920.000 |
|     | i. Nilai pagu dana di atas<br>Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar   | OB     | Rp3.320.000 |
|     | j. Nilai pagu dana di atas<br>Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar   | OB     | Rp3.720.000 |
|     | k. Nilai pagu dana di atas<br>Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar  | OB     | Rp4.130.000 |
|     | l. Nilai pagu dana di atas<br>Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OB     | Rp4.630.000 |
|     | m. Nilai pagu dana di atas<br>Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OB     | Rp5.130.000 |
|     | n. Nilai pagu dana di atas<br>Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OB     | Rp5.640.000 |
|     | o. Nilai pagu dana di atas<br>Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun  | OB     | Rp6.140.000 |
|     | p. Nilai pagu dana di atas<br>Rp1 triliun                    | OB     | Rp7.140.000 |
|     |                                                              |        |             |

1.1.3. Pejabat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

| NO  | URAIAN                                                                                                                                | SATUAN | BESARAN     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                   | (3)    | (4)         |
|     | 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah |        |             |
|     | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                                                                                                    | OB     | Rp400.000   |
|     | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta                                                                                 | OB     | Rp480.000   |
|     | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta                                                                                 | OB     | Rp570.000   |
|     | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar                                                                                 | OB     | Rp660.000   |
|     | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar                                                                               | OB     | Rp770.000   |
|     | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar                                                                               | OB     | Rp880.000   |
|     | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar                                                                                | OB     | Rp990.000   |
|     | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar                                                                               | OB     | Rp1.250.000 |
|     | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar                                                                               | OB     | Rp1.520.000 |
|     | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar                                                                               | OB     | Rp1.780.000 |
|     | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar                                                                              | OB     | Rp2.040.000 |
|     | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar                                                                             | OB     | Rp2.440.000 |
|     | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar                                                                             | OB     | Rp2.830.000 |
|     | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar                                                                             | OB     | Rp3.230.000 |
|     | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun                                                                              | OB     | Rp3.620.000 |
|     | p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun                                                                                                | OB     | Rp4.420.000 |
|     |                                                                                                                                       |        |             |
|     | 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan                                                                                 |        |             |
|     | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                                                                                                    | OB     | Rp340.000   |
|     | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta                                                                                 | OB     | Rp420.000   |
|     | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta                                                                                 | OB     | Rp500.000   |

d. Nilai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

| NO  | URAIAN                                                                  | SATUAN | BESARAN     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| (1) | (2)                                                                     | (3)    | (4)         |
|     | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar                   | OB     | Rp570.000   |
|     | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar                 | OB     | Rp670.000   |
|     | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar                 | OB     | Rp770.000   |
|     | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar                  | OB     | Rp860.000   |
|     | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar                 | OB     | Rp1.090.000 |
|     | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar                 | OB     | Rp1.320.000 |
|     | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar                 | OB     | Rp1.550.000 |
|     | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar                | OB     | Rp1.780.000 |
|     | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar               | OB     | Rp2.120.000 |
|     | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar               | OB     | Rp2.470.000 |
|     | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar               | OB     | Rp2.810.000 |
|     | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun                | OB     | Rp3.160.000 |
|     | p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun                                  | OB     | Rp3.840.000 |
|     |                                                                         |        |             |
|     | 1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu |        |             |
|     | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                                      | OB     | Rp260.000   |
|     | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta                   | OB     | Rp310.000   |
|     | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta                   | OB     | Rp370.000   |
|     | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar                   | OB     | Rp430.000   |
|     | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar                 | OB     | Rp500.000   |
|     | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar                 | OB     | Rp570.000   |
|     | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar                  | OB     | Rp640.000   |

h. Nilai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

| NO   | URAIAN                                                                                      | SATUAN | BESARAN     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| (1)  | (2)                                                                                         | (3)    | (4)         |
|      | h. Nilai pagu dana di atas<br>Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar                                  | OB     | Rp810.000   |
|      | i. Nilai pagu dana di atas<br>Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar                                  | OB     | Rp980.000   |
|      | j. Nilai pagu dana di atas<br>Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar                                  | OB     | Rp1.150.000 |
|      | k. Nilai pagu dana di atas<br>Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar                                 | OB     | Rp1.330.000 |
|      | l. Nilai pagu dana di atas<br>Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar                                | OB     | Rp1.580.000 |
|      | m. Nilai pagu dana di atas<br>Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar                                | OB     | Rp1.840.000 |
|      | n. Nilai pagu dana di atas<br>Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar                                | OB     | Rp2.090.000 |
|      | o. Nilai pagu dana di atas<br>Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun                                 | OB     | Rp2.350.000 |
|      | p. Nilai pagu dana di atas<br>Rp1 triliun                                                   | OB     | Rp2.860.000 |
|      |                                                                                             |        |             |
| 1.2. | HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA                                                            |        |             |
|      | 1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan<br>Barang/Jasa                                           | OB     | Rp680.000   |
|      | 1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan<br>Pengadaan Barang/Jasa                          |        |             |
|      | 1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan<br>Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan<br>Konstruksi |        |             |
|      | a. Nilai pagu dana di atas<br>Rp200 juta s.d. Rp500 juta                                    | OP     | Rp850.000   |
|      | b. Nilai pagu dana di atas<br>Rp500 juta s.d. Rp1 miliar                                    | OP     | Rp1.020.000 |
|      | c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d.<br>Rp2,5 miliar                                  | OP     | Rp1.270.000 |
|      | d. Nilai pagu dana di atas<br>Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar                                  | OP     | Rp1.520.000 |
|      | e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d.<br>Rp10 miliar                                   | OP     | Rp1.780.000 |
|      | f. Nilai pagu dana di atas<br>Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar                                  | OP     | Rp2.120.000 |
|      | g. Nilai pagu dana di atas<br>Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar                                  | OP     | Rp2.450.000 |
|      | h. Nilai pagu dana di atas<br>Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar                                  | OP     | Rp2.790.000 |

i. Nilai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

| NO  | URAIAN                                                                      | SATUAN | BESARAN      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| (1) | (2)                                                                         | (3)    | (4)          |
|     | i. Nilai pagu dana di atas<br>Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar                 | OP     | Rp3.130.000  |
|     | j. Nilai pagu dana di atas<br>Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar                | OP     | Rp3.580.000  |
|     | k. Nilai pagu dana di atas<br>Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar                | OP     | Rp4.030.000  |
|     | l. Nilai pagu dana di atas<br>Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar                | OP     | Rp4.490.000  |
|     | m. Nilai pagu dana di atas<br>Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun                 | OP     | Rp4.940.000  |
|     | n. Nilai pagu dana di atas<br>Rp1 triliun                                   | OP     | Rp5.560.000  |
|     |                                                                             |        |              |
|     | 1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan<br>Unit Kerja Pengadaan Barang |        |              |
|     | a. Nilai pagu dana di atas<br>Rp200 juta s.d. Rp500 juta                    | OP     | Rp760.000    |
|     | b. Nilai pagu dana di atas<br>Rp500 juta s.d. Rp1 miliar                    | OP     | Rp920.000    |
|     | c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d.<br>Rp2,5 miliar                  | OP     | Rp1.140.000  |
|     | d. Nilai pagu dana di atas<br>Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar                  | OP     | Rp1.370.000  |
|     | e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d.<br>Rp10 miliar                   | OP     | Rp1.600.000  |
|     | f. Nilai pagu dana di atas<br>Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar                  | OP     | Rp 1.910.000 |
|     | g. Nilai pagu dana di atas<br>Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar                  | OP     | Rp2.210.000  |
|     | h. Nilai pagu dana di atas<br>Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar                  | OP     | Rp2.520.000  |
|     | i. Nilai pagu dana di atas<br>Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar                 | OP     | Rp2.820.000  |
|     | j. Nilai pagu dana di atas<br>Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar                | OP     | Rp3.230.000  |
|     | k. Nilai pagu dana di atas<br>Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar                | OP     | Rp3.640.000  |
|     | l. Nilai pagu dana di atas<br>Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar                | OP     | Rp4.040.000  |
|     | m. Nilai pagu dana di atas<br>Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun                 | OP     | Rp4.450.000  |
|     | n. Nilai pagu dana di atas<br>Rp1 triliun                                   | OP     | Rp5.010.000  |

1.2.2.3. Honoraruim . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

| NO  | URAIAN                                                                             | SATUAN | BESARAN      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| (1) | (2)                                                                                | (3)    | (4)          |
|     |                                                                                    |        |              |
|     | 1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi |        |              |
|     | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta         | OP     | Rp480.000    |
|     | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta         | OP     | Rp600.000    |
|     | c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar         | OP     | Rp720.000    |
|     | d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar       | OP     | Rp910.000    |
|     | e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar       | OP     | Rp1.090.000  |
|     | f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar        | OP     | Rp 1.270.000 |
|     | g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar       | OP     | Rp 1.510.000 |
|     | h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar       | OP     | Rp1.750.000  |
|     | i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar       | OP     | Rp1.990.000  |
|     | j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar      | OP     | Rp2.230.000  |
|     | k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar     | OP     | Rp2.560.000  |
|     | l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar     | OP     | Rp2.880.000  |
|     | m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar     | OP     | Rp3.200.000  |
|     | n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun      | OP     | Rp3.520.000  |
|     | o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun                       | OP     | Rp3.960.000  |
|     |                                                                                    |        |              |
|     | 1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya      |        |              |
|     | a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta             | OP     | Rp600.000    |
|     | b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar             | OP     | Rp720.000    |
|     | c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar           | OP     | Rp910.000    |

d. Nilai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

| NO   | URAIAN                                                                                         | SATUAN | BESARAN      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| (1)  | (2)                                                                                            | (3)    | (4)          |
|      | d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar                       | OP     | Rp1.090.000  |
|      | e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar                        | OP     | Rp 1.270.000 |
|      | f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar                       | OP     | Rp 1.510.000 |
|      | g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar                       | OP     | Rp1.750.000  |
|      | h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar                       | OP     | Rp1.990.000  |
|      | i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar                      | OP     | Rp2.230.000  |
|      | j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar                     | OP     | Rp2.560.000  |
|      | k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar                     | OP     | Rp2.880.000  |
|      | l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar                     | OP     | Rp3.200.000  |
|      | m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun                      | OP     | Rp3.520.000  |
|      | n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun                                       | OP     | Rp3.960.000  |
|      |                                                                                                |        |              |
| 1.3. | HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA<br>PENGADAAN BARANG DAN JASA                                   |        |              |
|      | 1.3.1. Kepala                                                                                  | OB     | Rp1.000.000  |
|      | 1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung                                                               | OB     | Rp750.000    |
|      |                                                                                                |        |              |
| 1.4. | HONORARIUM<br>NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/<br>PEMBAWA ACARA/PANITIA                          |        |              |
|      | 1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas                                                          |        |              |
|      | a. Menteri/Pejabat Setingkat<br>Menteri/Pejabat Negara Lainnya                                 | OJ     | Rp1.700.000  |
|      | b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat<br>Kepala Daerah/Pejabat Daerah<br>Lainnya yang Disetarakan | OJ     | Rp1.400.000  |
|      | c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan                                                          | OJ     | Rp1.200.000  |
|      | d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan                                                         | OJ     | Rp1.000.000  |
|      | e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang<br>disetarakan                                            | OJ     | Rp900.000    |

1.4.2. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

| NO   | URAIAN                                                                   | SATUAN | BESARAN     |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| (1)  | (2)                                                                      | (3)    | (4)         |
|      | 1.4.2. Honorarium Moderator                                              | OK     | Rp700.000   |
|      | 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara                                          | OK     | Rp400.000   |
|      | 1.4.4. Honorarium Panitia                                                |        |             |
|      | a. Penanggung Jawab                                                      | OK     | Rp450.000   |
|      | b. Ketua/Wakil Ketua                                                     | OK     | Rp400.000   |
|      | c. Sekretaris                                                            | OK     | Rp300.000   |
|      | d. Anggota                                                               | OK     | Rp300.000   |
|      |                                                                          |        |             |
| 1.5. | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN |        |             |
|      | 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                                 |        |             |
|      | 1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah                              |        |             |
|      | a. Pengarah                                                              | OB     | Rp1.500.000 |
|      | b. Penanggung Jawab                                                      | OB     | Rp1.250.000 |
|      | c. Ketua                                                                 | OB     | Rp1.000.000 |
|      | d. Wakil Ketua                                                           | OB     | Rp850.000   |
|      | e. Sekretaris                                                            | OB     | Rp750.000   |
|      | f. Anggota                                                               | OB     | Rp750.000   |
|      | 1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah                          |        |             |
|      | a. Pengarah                                                              | OB     | Rp750.000   |
|      | b. Penanggung Jawab                                                      | OB     | Rp700.000   |
|      | c. Ketua                                                                 | OB     | Rp650.000   |
|      | d. Wakil Ketua                                                           | OB     | Rp600.000   |
|      | e. Sekretaris                                                            | OB     | Rp500.000   |
|      | f. Anggota                                                               | OB     | Rp500.000   |
|      | 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                     |        |             |
|      | 1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah                          |        |             |
|      | a. Ketua/Wakil Ketua                                                     | OB     | Rp250.000   |
|      | b. Anggota                                                               | OB     | Rp220.000   |
|      |                                                                          |        |             |
| 1.6. | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA             |        |             |
|      | 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli                     | OK     | Rp1.800.000 |
|      | 1.6.2. Honorarium Beracara                                               | OK     | Rp1.800.000 |
|      |                                                                          |        |             |

1.7. HONORARIUM . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

| NO   | URAIAN                                                                                                         | SATUAN | BESARAN     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| (1)  | (2)                                                                                                            | (3)    | (4)         |
| 1.7. | HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL                                                                   |        |             |
|      | 1.7.1. SMA                                                                                                     | OB     | Rp2.100.000 |
|      | 1.7.2. Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan                                                   | OB     | Rp2.400.000 |
|      | 1.7.3. Sarjana (S-1)                                                                                           | OB     | Rp2.600.000 |
|      | 1.7.4. Magister (S-2)                                                                                          | OB     | Rp2.800.000 |
|      | 1.7.5. Doktor (S-3)                                                                                            | OB     | Rp3.000.000 |
| 1.8. | HONORARIUM ROHANIWAN                                                                                           | OK     | Rp400.000   |
| 1.9. | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/<br>BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI<br>INFORMASI/PENGELOLA <i>WEBSITE</i> |        |             |
|      | 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal                                                                        |        |             |
|      | a. Penanggung Jawab                                                                                            | Oter   | Rp500.000   |
|      | b. Redaktur                                                                                                    | Oter   | Rp400.000   |
|      | c. Penyunting/Editor                                                                                           | Oter   | Rp300.000   |
|      | d. Desain Grafis                                                                                               | Oter   | Rp180.000   |
|      | e. Fotografer                                                                                                  | Oter   | Rp180.000   |
|      | f. Sekretariat                                                                                                 | Oter   | Rp150.000   |
|      | 1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan<br>Buletin/Majalah                                                            |        |             |
|      | a. Penanggung Jawab                                                                                            | Oter   | Rp400.000   |
|      | b. Redaktur                                                                                                    | Oter   | Rp300.000   |
|      | c. Penyunting/Editor                                                                                           | Oter   | Rp250.000   |
|      | d. Desain Grafis                                                                                               | Oter   | Rp180.000   |
|      | e. Fotografer                                                                                                  | Oter   | Rp180.000   |
|      | f. Sekretariat                                                                                                 | Oter   | Rp150.000   |
|      | 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi<br>Informasi/Pengelola <i>Website</i>                                |        |             |
|      | a. Penanggung Jawab                                                                                            | OB     | Rp500.000   |
|      | b. Redaktur                                                                                                    | OB     | Rp450.000   |
|      | c. Editor                                                                                                      | OB     | Rp400.000   |
|      | d. Web Admin                                                                                                   | OB     | Rp350.000   |
|      | e. Web Developer                                                                                               | OB     | Rp300.000   |

1.9.4. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

| NO   | URAIAN                                                                                         | SATUAN            | BESARAN     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| (1)  | (2)                                                                                            | (3)               | (4)         |
|      | 1.9.4. Honorarium Penulis Artikel                                                              |                   |             |
|      | a. Penulis Artikel Jurnal                                                                      | Per Halaman       | Rp200.000   |
|      | b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website                                                    | Per Halaman       | Rp100.000   |
|      |                                                                                                |                   |             |
| 1.10 | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN                                                                 |                   |             |
|      | 1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar                                |                   |             |
|      | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian                                                           | Naskah/ Pelajaran | Rp150.000   |
|      | b. Pengawas Ujian                                                                              | OH                | Rp240.000   |
|      | c. Pemeriksa Hasil Ujian                                                                       | Siswa/ Mata Ujian | Rp5.000     |
|      |                                                                                                |                   |             |
|      | 1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah                             |                   |             |
|      | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian                                                           | Naskah/ Pelajaran | Rp190.000   |
|      | b. Pengawas Ujian                                                                              | OH                | Rp270.000   |
|      | c. Pemeriksa Hasil Ujian                                                                       | Siswa/ Mata Ujian | Rp7.500     |
|      |                                                                                                |                   |             |
| 1.11 | HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA                         |                   |             |
|      | 1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota                       | Per Butir Soal    | Rp100.000   |
|      | 1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota                           |                   |             |
|      | a. Telaah Materi Soal                                                                          | Per Butir Soal    | Rp45.000    |
|      | b. Telaah Bahasa Soal                                                                          | Per Butir Soal    | Rp20.000    |
|      |                                                                                                |                   |             |
| 1.12 | HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)                          |                   |             |
|      | 1.12.1. Honorarium Penceramah                                                                  | OJP               | Rp1.000.000 |
|      | 1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara | OJP               | Rp300.000   |

1.12.3. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

| NO    | URAIAN                                                                                          | SATUAN    | BESARAN     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| (1)   | (2)                                                                                             | (3)       | (4)         |
|       | 1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara | OJP       | Rp200.000   |
|       | 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat                                                      | Per Modul | Rp5.000.000 |
|       | 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat                                        |           |             |
|       | a. Lama diklat s.d. 5 hari                                                                      |           |             |
|       | 1). Penanggung Jawab                                                                            | OK        | Rp450.000   |
|       | 2). Ketua/Wakil Ketua                                                                           | OK        | Rp400.000   |
|       | 3). Sekretaris                                                                                  | OK        | Rp300.000   |
|       | 4). Anggota                                                                                     | OK        | Rp300.000   |
|       | b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari                                                                   |           |             |
|       | 1). Penanggung Jawab                                                                            | OK        | Rp675.000   |
|       | 2). Ketua/Wakil Ketua                                                                           | OK        | Rp600.000   |
|       | 3). Sekretaris                                                                                  | OK        | Rp450.000   |
|       | 4). Anggota                                                                                     | OK        | Rp450.000   |
|       | c. Lama diklat lebih dari 30 hari                                                               |           |             |
|       | 1). Penanggung Jawab                                                                            | OK        | Rp900.000   |
|       | 2). Ketua/Wakil Ketua                                                                           | OK        | Rp800.000   |
|       | 3). Sekretaris                                                                                  | OK        | Rp600.000   |
|       | 4). Anggota                                                                                     | OK        | Rp600.000   |
|       |                                                                                                 |           |             |
| 1.13. | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH                                                       |           |             |
|       | 1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                               |           |             |
|       | a. Pembina                                                                                      | OB        | Rp3.500.000 |
|       | b. Pengarah                                                                                     | OB        | Rp3.000.000 |
|       | c. Ketua                                                                                        | OB        | Rp2.500.000 |
|       | d. Wakil Ketua                                                                                  | OB        | Rp2.000.000 |
|       | e. Sekretaris                                                                                   | OB        | Rp1.500.000 |
|       | f. Anggota                                                                                      | OB        | Rp1.300.000 |
|       | 1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                   |           |             |
|       | a. Ketua                                                                                        | OB        | Rp1.000.000 |
|       | b. Sekretaris                                                                                   | OB        | Rp900.000   |
|       | c. Anggota                                                                                      | OB        | Rp600.000   |

1.14. HONORARIUM . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

| NO    | URAIAN                                     | SATUAN | BESARAN   |
|-------|--------------------------------------------|--------|-----------|
| (1)   | (2)                                        | (3)    | (4)       |
| 1.14. | HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH    |        |           |
|       | 1.14.1. Pengurus Barang Pengelola          | OB     | Rp500.000 |
|       | 1.14.2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola | OB     | Rp450.000 |
|       | 1.14.3. Pengurus Barang Pengguna           | OB     | Rp400.000 |
|       | 1.14.4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna  | OB     | Rp350.000 |
|       | 1.14.5. Pengurus Barang Pembantu           | OB     | Rp300.000 |

**2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- a. uang harian;
- b. uang representasi; dan
- c. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

2.1. SATUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

**2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
DAN UANG REPRESENTASI**

**1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajiban.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

**TABEL 1.2  
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

| NO. | PROVINSI         | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA<br>LEBIH DARI 8<br>(DELAPAN) JAM | DIKLAT    |
|-----|------------------|--------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)              | (3)    | (4)       | (5)                                         | (6)       |
| 1.  | ACEH             | OH     | Rp360.000 | Rp140.000                                   | Rp110.000 |
| 2.  | SUMATERA UTARA   | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 3.  | R I A U          | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU   | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 5.  | J A M B I        | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 6.  | SUMATERA BARAT   | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |

8. LAMPUNG ....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA<br>LEBIH DARI 8<br>(DELAPAN) JAM | DIKLAT    |
|-----|---------------------|--------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)       | (5)                                         | (6)       |
| 8.  | LAMPUNG             | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 9.  | BENGKULU            | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OH     | Rp410.000 | Rp160.000                                   | Rp120.000 |
| 11. | B A N T E N         | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 12. | JAWA BARAT          | OH     | Rp430.000 | Rp170.000                                   | Rp130.000 |
| 13. | DKI JAKARTA         | OH     | Rp530.000 | Rp210.000                                   | Rp160.000 |
| 14. | JAWA TENGAH         | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | Rp420.000 | Rp170.000                                   | Rp130.000 |
| 16. | JAWA TIMUR          | OH     | Rp410.000 | Rp160.000                                   | Rp120.000 |
| 17. | B A L I             | OH     | Rp480.000 | Rp190.000                                   | Rp140.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | Rp440.000 | Rp180.000                                   | Rp130.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | Rp430.000 | Rp170.000                                   | Rp130.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | Rp360.000 | Rp140.000                                   | Rp110.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | Rp430.000 | Rp170.000                                   | Rp130.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | Rp430.000 | Rp170.000                                   | Rp130.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 26. | GORONTALO           | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OH     | Rp410.000 | Rp160.000                                   | Rp120.000 |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OH     | Rp430.000 | Rp170.000                                   | Rp130.000 |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OH     | Rp370.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 31. | MALUKU              | OH     | Rp380.000 | Rp150.000                                   | Rp110.000 |
| 32. | MALUKU UTARA        | OH     | Rp430.000 | Rp170.000                                   | Rp130.000 |
| 33. | P A P U A           | OH     | Rp580.000 | Rp230.000                                   | Rp170.000 |
| 34. | PAPUA BARAT         | OH     | Rp480.000 | Rp190.000                                   | Rp140.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA    | OH     | Rp480.000 | Rp190.000                                   | Rp140.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH        | OH     | Rp580.000 | Rp230.000                                   | Rp170.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN       | OH     | Rp580.000 | Rp230.000                                   | Rp170.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN    | OH     | Rp580.000 | Rp230.000                                   | Rp170.000 |

**2. Uang Representasi Perjalanan Dinas**

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya *tips* porter, *tips* pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

**TABEL 1.3**  
**UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

| NO. | PROVINSI                          | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA<br>LEBIH DARI<br>8 (DELAPAN) JAM |
|-----|-----------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------|
| (1) | (2)                               | (3)    | (4)       | (5)                                         |
| 1.  | PEJABAT NEGARA,<br>PEJABAT DAERAH | OH     | Rp250.000 | Rp125.000                                   |
| 2.  | PEJABAT ESELON I                  | OH     | Rp200.000 | Rp100.000                                   |
| 3.  | PEJABAT ESELON II                 | OH     | Rp150.000 | Rp75.000                                    |

**2.2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*). Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

**TABEL 1.4**  
**BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

| NO. | PROVINSI         | SATUAN | KEPALA<br>DAERAH/<br>PIMPINAN<br>DPRD/PEJABAT<br>ESELON I | ANGGOTA<br>DPRD/<br>PEJABAT<br>ESELON II | PEJABAT<br>ESELON III/<br>GOLONGAN IV | PEJABAT<br>ESELON IV/<br>GOLONGAN III,<br>II dan I |
|-----|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (1) | (2)              | (3)    | (4)                                                       | (5)                                      | (6)                                   | (7)                                                |
| 1.  | ACEH             | OH     | Rp4.420.000                                               | Rp3.526.000                              | Rp1.533.000                           | Rp770.000                                          |
| 2.  | SUMATERA UTARA   | OH     | Rp4.960.000                                               | Rp2.195.000                              | Rp1.100.000                           | Rp699.000                                          |
| 3.  | RIAU             | OH     | Rp3.820.000                                               | Rp3.119.000                              | Rp1.650.000                           | Rp852.000                                          |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU   | OH     | Rp5.344.000                                               | Rp2.318.000                              | Rp1.297.000                           | Rp792.000                                          |
| 5.  | JAMBI            | OH     | Rp5.000.000                                               | Rp4.102.000                              | Rp1.225.000                           | Rp580.000                                          |
| 6.  | SUMATERA BARAT   | OH     | Rp5.236.000                                               | Rp3.332.000                              | Rp1.353.000                           | Rp701.000                                          |
| 7.  | SUMATERA SELATAN | OH     | Rp5.850.000                                               | Rp3.083.000                              | Rp1.955.000                           | Rp861.000                                          |
| 8.  | LAMPUNG          | OH     | Rp4.491.000                                               | Rp2.488.000                              | Rp1.425.000                           | Rp580.000                                          |
| 9.  | BENGKULU         | OH     | Rp2.140.000                                               | Rp1.628.000                              | Rp1.546.000                           | Rp692.000                                          |

10. BANGKA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | KEPALA<br>DAERAH/<br>PIMPINAN<br>DPRD/PEJABAT<br>ESELON I | ANGGOTA<br>DPRD/<br>PEJABAT<br>ESELON II | PEJABAT<br>ESELON III/<br>GOLONGAN IV | PEJABAT<br>ESELON IV/<br>GOLONGAN III,<br>II dan I |
|-----|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)                                                       | (5)                                      | (6)                                   | (7)                                                |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OH     | Rp3.827.000                                               | Rp2.838.000                              | Rp1.957.000                           | Rp649.000                                          |
| 11. | B A N T E N         | OH     | Rp5.725.000                                               | Rp2.373.000                              | Rp1.204.000                           | Rp724.000                                          |
| 12. | JAWA BARAT          | OH     | Rp5.381.000                                               | Rp2.755.000                              | Rp1.201.000                           | Rp686.000                                          |
| 13. | DKI JAKARTA         | OH     | Rp8.720.000                                               | Rp2.063.000                              | Rp992.000                             | Rp730.000                                          |
| 14. | JAWA TENGAH         | OH     | Rp5.303.000                                               | Rp1.850.000                              | Rp1.201.000                           | Rp750.000                                          |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | Rp5.017.000                                               | Rp2.695.000                              | Rp1.384.000                           | Rp845.000                                          |
| 16. | JAWA TIMUR          | OH     | Rp4.449.000                                               | Rp2.007.000                              | Rp1.153.000                           | Rp814.000                                          |
| 17. | B A L I             | OH     | Rp6.848.000                                               | Rp2.433.000                              | Rp1.685.000                           | Rp1.138.000                                        |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | Rp4.375.000                                               | Rp2.648.000                              | Rp1.418.000                           | Rp907.000                                          |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | Rp3.750.000                                               | Rp2.133.000                              | Rp1.355.000                           | Rp688.000                                          |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | Rp2.654.000                                               | Rp1.923.000                              | Rp1.125.000                           | Rp538.000                                          |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | Rp4.901.000                                               | Rp3.391.000                              | Rp1.160.000                           | Rp659.000                                          |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | Rp4.797.000                                               | Rp3.316.000                              | Rp1.500.000                           | Rp697.000                                          |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | Rp4.000.000                                               | Rp2.188.000                              | Rp1.507.000                           | Rp804.000                                          |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | Rp4.000.000                                               | Rp2.735.000                              | Rp1.507.000                           | Rp904.000                                          |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OH     | Rp4.919.000                                               | Rp2.290.000                              | Rp1.207.000                           | Rp978.000                                          |
| 26. | GORONTALO           | OH     | Rp4.168.000                                               | Rp3.107.000                              | Rp1.606.000                           | Rp955.000                                          |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OH     | Rp4.076.000                                               | Rp3.098.000                              | Rp1.344.000                           | Rp704.000                                          |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OH     | Rp4.820.000                                               | Rp1.938.000                              | Rp1.423.000                           | Rp745.000                                          |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OH     | Rp2.309.000                                               | Rp2.027.000                              | Rp1.679.000                           | Rp951.000                                          |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OH     | Rp3.088.800                                               | Rp2.574.000                              | Rp1.297.000                           | Rp786.000                                          |
| 31. | MALUKU              | OH     | Rp3.467.000                                               | Rp3.240.000                              | Rp1.059.000                           | Rp667.000                                          |
| 32. | MALUKU UTARA        | OH     | Rp4.611.600                                               | Rp3.843.000                              | Rp1.160.000                           | Rp605.000                                          |
| 33. | P A P U A           | OH     | Rp3.859.000                                               | Rp3.318.000                              | Rp2.521.000                           | Rp1.038.000                                        |
| 34. | PAPUA BARAT         | OH     | Rp3.872.000                                               | Rp3.341.000                              | Rp2.056.000                           | Rp967.000                                          |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA    | OH     | Rp3.872.000                                               | Rp3.341.000                              | Rp2.056.000                           | Rp967.000                                          |
| 36. | PAPUA TENGAH        | OH     | Rp3.859.000                                               | Rp3.318.000                              | Rp2.521.000                           | Rp1.038.000                                        |
| 37. | PAPUA SELATAN       | OH     | Rp5.673.000                                               | Rp4.877.000                              | Rp3.706.000                           | Rp1.526.000                                        |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN    | OH     | Rp5.711.000                                               | Rp4.911.000                              | Rp3.731.000                           | Rp1.536.000                                        |

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

**3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

**3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor**

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

**a. paket *Fullboard***

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

**b. paket *Fullday***

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

**c. paket *Halfday***

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

**d. paket *Residence***

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
  - 1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - 2). untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

TABEL 1.5  
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | HALFDAY   | FULLDAY   | FULLBOARD   | RESIDENCE   |
|-----|---------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)       | (5)       | (6)         | (7)         |
| 1.  | ACEH                | OP     | Rp453.000 | Rp663.000 | Rp1.732.000 | Rp1.116.000 |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OP     | Rp451.000 | Rp675.000 | Rp1.350.000 | Rp1.126.000 |
| 3.  | R I A U             | OP     | Rp319.000 | Rp582.000 | Rp1.229.000 | Rp901.000   |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OP     | Rp471.000 | Rp634.000 | Rp1.484.000 | Rp1.105.000 |
| 5.  | J A M B I           | OP     | Rp465.000 | Rp595.000 | Rp1.538.000 | Rp1.060.000 |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OP     | Rp351.000 | Rp502.000 | Rp1.492.000 | Rp853.000   |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OP     | Rp489.000 | Rp718.000 | Rp1.448.000 | Rp1.207.000 |
| 8.  | LAMPUNG             | OP     | Rp452.000 | Rp577.000 | Rp1.200.000 | Rp1.029.000 |
| 9.  | BENGKULU            | OP     | Rp383.000 | Rp538.000 | Rp1.262.000 | Rp921.000   |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OP     | Rp555.000 | Rp714.000 | Rp1.632.000 | Rp1.269.000 |
| 11. | B A N T E N         | OP     | Rp678.000 | Rp930.000 | Rp1.752.000 | Rp1.608.000 |
| 12. | JAWA BARAT          | OP     | Rp567.000 | Rp799.000 | Rp1.914.000 | Rp1.366.000 |
| 13. | DKI JAKARTA         | OP     | Rp760.000 | Rp993.000 | Rp2.257.000 | Rp1.753.000 |
| 14. | JAWA TENGAH         | OP     | Rp426.000 | Rp738.000 | Rp1.576.000 | Rp1.164.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OP     | Rp458.000 | Rp607.000 | Rp1.470.000 | Rp1.065.000 |
| 16. | JAWA TIMUR          | OP     | Rp442.000 | Rp710.000 | Rp2.159.000 | Rp1.152.000 |
| 17. | B A L I             | OP     | Rp737.000 | Rp907.000 | Rp2.523.000 | Rp1.644.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OP     | Rp503.000 | Rp800.000 | Rp1.413.000 | Rp1.303.000 |

19. NUSA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | HALFDAY   | FULLDAY     | FULLBOARD   | RESIDENCE   |
|-----|---------------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)       | (5)         | (6)         | (7)         |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OP     | Rp642.000 | Rp1.046.000 | Rp2.013.000 | Rp1.688.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OP     | Rp462.000 | Rp617.000   | Rp1.247.000 | Rp1.079.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OP     | Rp455.000 | Rp679.000   | Rp2.092.200 | Rp1.134.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OP     | Rp380.000 | Rp545.000   | Rp1.340.900 | Rp925.000   |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OP     | Rp423.000 | Rp750.000   | Rp1.250.000 | Rp1.173.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OP     | Rp393.000 | Rp722.700   | Rp1.763.300 | Rp1.115.700 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OP     | Rp490.000 | Rp620.000   | Rp1.250.000 | Rp1.110.000 |
| 26. | GORONTALO           | OP     | Rp390.000 | Rp562.000   | Rp2.296.800 | Rp952.000   |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OP     | Rp390.000 | Rp574.000   | Rp1.301.000 | Rp964.000   |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OP     | Rp403.000 | Rp583.000   | Rp2.218.000 | Rp986.000   |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OP     | Rp440.000 | Rp652.000   | Rp1.672.000 | Rp1.092.000 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OP     | Rp510.000 | Rp552.000   | Rp1.335.000 | Rp949.000   |
| 31. | MALUKU              | OP     | Rp463.000 | Rp638.000   | Rp1.881.000 | Rp1.101.000 |
| 32. | MALUKU UTARA        | OP     | Rp575.000 | Rp693.000   | Rp1.220.000 | Rp1.268.000 |
| 33. | P A P U A           | OP     | Rp482.000 | Rp768.000   | Rp2.063.000 | Rp1.250.000 |
| 34. | PAPUA BARAT         | OP     | Rp503.000 | Rp728.000   | Rp1.952.000 | Rp1.231.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA    | OP     | Rp503.000 | Rp728.000   | Rp1.952.000 | Rp1.231.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH        | OP     | Rp482.000 | Rp768.000   | Rp2.063.000 | Rp1.250.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN       | OP     | Rp709.000 | Rp1.129.000 | Rp3.033.000 | Rp1.838.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN    | OP     | Rp739.000 | Rp1.070.000 | Rp2.869.000 | Rp1.809.000 |

**TABEL 1.6**  
**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**  
**SETINGKAT ESELON II**

| NO. | PROVINSI         | SATUAN | HALFDAY   | FULLDAY   | FULLBOARD   | RESIDENCE   |
|-----|------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| (1) | (2)              | (3)    | (4)       | (5)       | (6)         | (7)         |
| 1.  | ACEH             | OP     | Rp413.000 | Rp575.000 | Rp1.075.000 | Rp988.000   |
| 2.  | SUMATERA UTARA   | OP     | Rp411.000 | Rp511.000 | Rp1.011.000 | Rp922.000   |
| 3.  | R I A U          | OP     | Rp279.000 | Rp432.000 | Rp1.084.000 | Rp711.000   |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU   | OP     | Rp431.000 | Rp531.000 | Rp1.170.000 | Rp962.000   |
| 5.  | J A M B I        | OP     | Rp425.000 | Rp525.000 | Rp1.298.000 | Rp950.000   |
| 6.  | SUMATERA BARAT   | OP     | Rp311.000 | Rp432.000 | Rp987.000   | Rp743.000   |
| 7.  | SUMATERA SELATAN | OP     | Rp391.000 | Rp502.000 | Rp1.030.000 | Rp893.000   |
| 8.  | LAMPUNG          | OP     | Rp421.000 | Rp512.000 | Rp950.000   | Rp933.000   |
| 9.  | BENGKULU         | OP     | Rp343.000 | Rp468.000 | Rp1.062.000 | Rp811.000   |
| 10. | BANGKA BELITUNG  | OP     | Rp449.000 | Rp582.000 | Rp1.115.000 | Rp1.031.000 |
| 11. | B A N T E N      | OP     | Rp502.000 | Rp632.000 | Rp1.201.000 | Rp1.134.000 |
| 12. | JAWA BARAT       | OP     | Rp474.000 | Rp692.000 | Rp1.110.000 | Rp1.166.000 |
| 13. | DKI JAKARTA      | OP     | Rp542.000 | Rp667.000 | Rp1.347.000 | Rp1.209.000 |
| 14. | JAWA TENGAH      | OP     | Rp303.000 | Rp474.000 | Rp919.000   | Rp777.000   |

15. D.I. YOGYAKARTA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | HALFDAY   | FULLDAY     | FULLBOARD   | RESIDENCE   |
|-----|---------------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)       | (5)         | (6)         | (7)         |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OP     | Rp332.000 | Rp507.000   | Rp1.204.000 | Rp839.000   |
| 16. | JAWA TIMUR          | OP     | Rp398.000 | Rp623.000   | Rp1.784.000 | Rp1.021.000 |
| 17. | B A L I             | OP     | Rp488.000 | Rp652.000   | Rp1.569.000 | Rp1.140.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OP     | Rp488.000 | Rp713.000   | Rp1.213.000 | Rp1.201.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OP     | Rp463.000 | Rp602.000   | Rp1.294.000 | Rp1.065.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OP     | Rp422.000 | Rp547.000   | Rp1.047.000 | Rp969.000   |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OP     | Rp415.000 | Rp609.000   | Rp1.902.000 | Rp1.024.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OP     | Rp340.000 | Rp475.000   | Rp1.219.000 | Rp815.000   |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OP     | Rp324.000 | Rp478.000   | Rp1.050.000 | Rp802.000   |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OP     | Rp373.000 | Rp657.000   | Rp1.603.000 | Rp1.030.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OP     | Rp450.000 | Rp550.000   | Rp1.050.000 | Rp1.000.000 |
| 26. | GORONTALO           | OP     | Rp350.000 | Rp492.000   | Rp2.088.000 | Rp842.000   |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OP     | Rp350.000 | Rp504.000   | Rp1.101.000 | Rp854.000   |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OP     | Rp363.000 | Rp513.000   | Rp1.574.000 | Rp876.000   |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OP     | Rp400.000 | Rp582.000   | Rp1.520.000 | Rp982.000   |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OP     | Rp464.000 | Rp604.000   | Rp1.171.000 | Rp1.068.000 |
| 31. | MALUKU              | OP     | Rp423.000 | Rp568.000   | Rp1.710.000 | Rp991.000   |
| 32. | MALUKU UTARA        | OP     | Rp523.000 | Rp623.000   | Rp1.050.000 | Rp1.146.000 |
| 33. | P A P U A           | OP     | Rp442.000 | Rp698.000   | Rp1.863.000 | Rp1.140.000 |
| 34. | PAPUA BARAT         | OP     | Rp463.000 | Rp658.000   | Rp1.752.000 | Rp1.121.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA    | OP     | Rp463.000 | Rp658.000   | Rp1.752.000 | Rp1.121.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH        | OP     | Rp442.000 | Rp698.000   | Rp1.863.000 | Rp1.140.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN       | OP     | Rp650.000 | Rp1.026.000 | Rp2.739.000 | Rp1.676.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN    | OP     | Rp650.000 | Rp1.026.000 | Rp2.739.000 | Rp1.676.000 |

**3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor**

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

**TABEL 1.7**  
**UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | FULLBOARD | FULLDAY/<br>HALFDAY DI<br>DALAM KOTA | RESIDENCE<br>DI DALAM<br>KOTA |
|-----|---------------------|--------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)       | (5)                                  | (6)                           |
| 1.  | ACEH                | OH     | Rp120.000 | Rp85.000                             | Rp120.000                     |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OH     | Rp130.000 | Rp95.000                             | Rp130.000                     |
| 3.  | RIAU                | OH     | Rp130.000 | Rp85.000                             | Rp130.000                     |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | Rp130.000 | Rp95.000                             | Rp130.000                     |
| 5.  | JAMBI               | OH     | Rp130.000 | Rp95.000                             | Rp130.000                     |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OH     | Rp120.000 | Rp85.000                             | Rp120.000                     |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OH     | Rp120.000 | Rp85.000                             | Rp120.000                     |
| 8.  | LAMPUNG             | OH     | Rp130.000 | Rp95.000                             | Rp130.000                     |
| 9.  | BENGKULU            | OH     | Rp130.000 | Rp95.000                             | Rp130.000                     |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OH     | Rp130.000 | Rp95.000                             | Rp130.000                     |
| 11. | BANTEN              | OH     | Rp120.000 | Rp85.000                             | Rp120.000                     |
| 12. | JAWA BARAT          | OH     | Rp150.000 | Rp105.000                            | Rp150.000                     |
| 13. | DKI JAKARTA         | OH     | Rp180.000 | Rp130.000                            | Rp180.000                     |
| 14. | JAWA TENGAH         | OH     | Rp130.000 | Rp95.000                             | Rp130.000                     |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | Rp140.000 | Rp100.000                            | Rp140.000                     |
| 16. | JAWA TIMUR          | OH     | Rp140.000 | Rp100.000                            | Rp140.000                     |
| 17. | BALI                | OH     | Rp160.000 | Rp115.000                            | Rp160.000                     |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | Rp150.000 | Rp105.000                            | Rp150.000                     |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | Rp140.000 | Rp100.000                            | Rp140.000                     |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | Rp130.000 | Rp95.000                             | Rp130.000                     |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | Rp120.000 | Rp85.000                             | Rp120.000                     |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | Rp130.000 | Rp95.000                             | Rp130.000                     |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | Rp150.000 | Rp105.000                            | Rp150.000                     |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | Rp150.000 | Rp105.000                            | Rp150.000                     |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OH     | Rp130.000 | Rp95.000                             | Rp130.000                     |
| 26. | GORONTALO           | OH     | Rp130.000 | Rp95.000                             | Rp130.000                     |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OH     | Rp120.000 | Rp85.000                             | Rp120.000                     |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OH     | Rp150.000 | Rp105.000                            | Rp150.000                     |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OH     | Rp130.000 | Rp95.000                             | Rp130.000                     |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OH     | Rp130.000 | Rp95.000                             | Rp130.000                     |
| 31. | MALUKU              | OH     | Rp120.000 | Rp85.000                             | Rp120.000                     |
| 32. | MALUKU UTARA        | OH     | Rp130.000 | Rp95.000                             | Rp130.000                     |
| 33. | PAPUA               | OH     | Rp200.000 | Rp140.000                            | Rp200.000                     |
| 34. | PAPUA BARAT         | OH     | Rp160.000 | Rp115.000                            | Rp160.000                     |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA    | OH     | Rp160.000 | Rp115.000                            | Rp160.000                     |
| 36. | PAPUA TENGAH        | OH     | Rp200.000 | Rp140.000                            | Rp200.000                     |
| 37. | PAPUA SELATAN       | OH     | Rp200.000 | Rp140.000                            | Rp200.000                     |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN    | OH     | Rp200.000 | Rp140.000                            | Rp200.000                     |

4. SATUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

**4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS**

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1.10, Tabel 1.11, dan Tabel 1.12.

**TABEL 1.8  
KENDARAAN DINAS PEJABAT**

| NO. | PROVINSI          | SATUAN | BESARAN       |
|-----|-------------------|--------|---------------|
| (1) | (2)               | (3)    | (4)           |
| I   | PEJABAT ESELON I  | Unit   | Rp878.913.000 |
| II  | PEJABAT ESELON II |        |               |
| 1.  | ACEH              | Unit   | Rp641.995.000 |
| 2.  | SUMATERA UTARA    | Unit   | Rp642.137.000 |
| 3.  | RIAU              | Unit   | Rp659.136.000 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU    | Unit   | Rp634.886.000 |
| 5.  | JAMBI             | Unit   | Rp684.521.000 |
| 6.  | SUMATERA BARAT    | Unit   | Rp599.334.000 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN  | Unit   | Rp776.179.000 |
| 8.  | LAMPUNG           | Unit   | Rp622.872.000 |
| 9.  | BENGKULU          | Unit   | Rp835.112.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG   | Unit   | Rp676.692.000 |
| 11. | BANTEN            | Unit   | Rp628.463.000 |
| 12. | JAWA BARAT        | Unit   | Rp616.154.000 |
| 13. | DKI JAKARTA       | Unit   | Rp708.826.000 |
| 14. | JAWA TENGAH       | Unit   | Rp639.680.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA   | Unit   | Rp795.363.000 |
| 16. | JAWA TIMUR        | Unit   | Rp764.021.000 |

17. BALI . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | BESARAN       |
|-----|---------------------|--------|---------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)           |
| 17. | BALI                | Unit   | Rp724.066.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | Unit   | Rp642.214.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | Unit   | Rp704.101.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | Unit   | Rp674.016.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | Unit   | Rp717.102.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | Unit   | Rp651.964.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | Unit   | Rp658.627.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | Unit   | Rp701.167.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | Unit   | Rp602.581.000 |
| 26. | GORONTALO           | Unit   | Rp596.309.000 |
| 27. | SULAWESI BARAT      | Unit   | Rp669.654.000 |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | Unit   | Rp586.696.000 |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | Unit   | Rp634.637.000 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | Unit   | Rp702.278.000 |
| 31. | MALUKU              | Unit   | Rp662.761.000 |
| 32. | MALUKU UTARA        | Unit   | Rp694.312.000 |
| 33. | PAPUA               | Unit   | Rp677.687.000 |
| 34. | PAPUA BARAT         | Unit   | Rp668.844.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA    | Unit   | Rp836.055.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH        | Unit   | Rp677.687.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN       | Unit   | Rp677.687.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN    | Unit   | Rp677.687.000 |

**TABEL 1.9**  
**KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN**  
**RODA 4 (EMPAT)**

| NO. | PROVINSI       | SATUAN | PICK UP       | MINIBUS       | DOUBLE GARDAN |
|-----|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| (1) | (2)            | (3)    | (4)           | (5)           | (6)           |
| 1.  | ACEH           | Unit   | Rp286.380.000 | Rp371.797.000 | Rp518.306.000 |
| 2.  | SUMATERA UTARA | Unit   | Rp261.525.000 | Rp372.705.000 | Rp501.507.000 |
| 3.  | R I A U        | Unit   | Rp293.937.000 | Rp399.289.000 | Rp475.248.000 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU | Unit   | Rp292.020.000 | Rp375.725.000 | Rp557.486.000 |

5. JAMBI . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | PICK UP       | MINIBUS       | DOUBLE<br>GARDAN |
|-----|---------------------|--------|---------------|---------------|------------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)           | (5)           | (6)              |
| 5.  | J A M B I           | Unit   | Rp296.683.000 | Rp407.020.000 | Rp554.258.000    |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | Unit   | Rp263.344.000 | Rp401.040.000 | Rp492.538.000    |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | Unit   | Rp268.272.000 | Rp398.974.000 | Rp516.336.000    |
| 8.  | LAMPUNG             | Unit   | Rp295.482.000 | Rp388.531.000 | Rp485.001.000    |
| 9.  | BENGKULU            | Unit   | Rp313.527.000 | Rp387.510.000 | Rp576.868.000    |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | Unit   | Rp291.421.000 | Rp399.978.000 | Rp544.094.000    |
| 11. | B A N T E N         | Unit   | Rp252.115.000 | Rp395.809.000 | Rp490.729.000    |
| 12. | JAWA BARAT          | Unit   | Rp278.590.000 | Rp397.179.000 | Rp533.909.000    |
| 13. | DKI JAKARTA         | Unit   | Rp270.420.000 | Rp402.379.000 | Rp500.913.000    |
| 14. | JAWA TENGAH         | Unit   | Rp277.265.000 | Rp375.987.000 | Rp532.934.000    |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | Unit   | Rp288.709.000 | Rp421.987.000 | Rp550.586.000    |
| 16. | JAWA TIMUR          | Unit   | Rp263.849.000 | Rp376.363.000 | Rp513.056.000    |
| 17. | B A L I             | Unit   | Rp268.583.000 | Rp387.739.999 | Rp543.714.000    |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | Unit   | Rp297.363.000 | Rp373.878.000 | Rp548.905.000    |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | Unit   | Rp316.446.000 | Rp426.069.000 | Rp528.028.000    |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | Unit   | Rp288.252.000 | Rp410.793.000 | Rp593.776.000    |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | Unit   | Rp339.040.000 | Rp399.240.000 | Rp516.400.000    |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | Unit   | Rp260.147.000 | Rp413.291.000 | Rp517.339.000    |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | Unit   | Rp292.848.000 | Rp376.200.000 | Rp513.762.000    |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | Unit   | Rp282.150.000 | Rp376.200.000 | Rp531.401.000    |
| 25. | SULAWESI UTARA      | Unit   | Rp255.700.000 | Rp376.452.000 | Rp577.008.000    |
| 26. | GORONTALO           | Unit   | Rp298.447.000 | Rp426.563.000 | Rp514.927.000    |
| 27. | SULAWESI BARAT      | Unit   | Rp459.123.000 | Rp382.359.000 | Rp517.895.000    |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | Unit   | Rp284.029.000 | Rp419.033.000 | Rp554.368.000    |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | Unit   | Rp308.028.000 | Rp412.483.000 | Rp501.024.000    |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | Unit   | Rp304.798.000 | Rp416.555.000 | Rp514.359.000    |
| 31. | MALUKU              | Unit   | Rp299.723.000 | Rp427.518.000 | Rp585.988.000    |
| 32. | MALUKU UTARA        | Unit   | Rp328.199.000 | Rp425.689.000 | Rp503.930.000    |
| 33. | P A P U A           | Unit   | Rp319.897.000 | Rp393.635.000 | Rp564.390.000    |
| 34. | PAPUA BARAT         | Unit   | Rp296.853.000 | Rp424.712.000 | Rp560.900.000    |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA    | Unit   | Rp296.853.000 | Rp424.712.000 | Rp560.900.000    |
| 36. | PAPUA TENGAH        | Unit   | Rp319.897.000 | Rp393.635.000 | Rp564.390.000    |
| 37. | PAPUA SELATAN       | Unit   | Rp319.897.000 | Rp393.635.000 | Rp564.390.000    |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN    | Unit   | Rp319.897.000 | Rp393.635.000 | Rp564.390.000    |

TABEL 1.10 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

**TABEL 1.10  
KENDARAAN OPERASIONAL BUS**

| NO. | URAIAN                     | SATUAN | BESARAN         |
|-----|----------------------------|--------|-----------------|
| (1) | (2)                        | (3)    | (4)             |
| 1.  | Roda 4 dan/atau Bus Kecil  | Unit   | Rp498.810.000   |
| 2.  | Roda 6 dan/atau Bus Sedang | Unit   | Rp768.820.000   |
| 3.  | Roda 6 dan/atau Bus Besar  | Unit   | Rp1.268.200.000 |

**TABEL 1.11  
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN  
RODA 2 (DUA)**

| NO. | PROVINSI         | SATUAN | OPERASIONAL  | LAPANGAN     |
|-----|------------------|--------|--------------|--------------|
| (1) | (2)              | (3)    | (4)          | (5)          |
| 1.  | ACEH             | Unit   | Rp37.464.000 | Rp37.798.000 |
| 2.  | SUMATERA UTARA   | Unit   | Rp38.879.000 | Rp41.140.000 |
| 3.  | R I A U          | Unit   | Rp35.688.000 | Rp40.258.000 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU   | Unit   | Rp36.727.000 | Rp41.861.000 |
| 5.  | J A M B I        | Unit   | Rp37.372.000 | Rp39.884.000 |
| 6.  | SUMATERA BARAT   | Unit   | Rp36.759.000 | Rp38.087.000 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN | Unit   | Rp35.009.000 | Rp40.222.000 |
| 8.  | LAMPUNG          | Unit   | Rp39.788.000 | Rp36.330.000 |
| 9.  | BENGKULU         | Unit   | Rp41.253.000 | Rp49.325.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG  | Unit   | Rp39.873.000 | Rp48.246.000 |
| 11. | B A N T E N      | Unit   | Rp33.789.000 | Rp37.106.000 |
| 12. | JAWA BARAT       | Unit   | Rp36.538.000 | Rp41.917.000 |
| 13. | DKI JAKARTA      | Unit   | Rp44.384.000 | Rp48.875.000 |
| 14. | JAWA TENGAH      | Unit   | Rp39.514.000 | Rp42.269.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA  | Unit   | Rp39.951.000 | Rp44.102.000 |
| 16. | JAWA TIMUR       | Unit   | Rp38.461.000 | Rp43.340.000 |
| 17. | B A L I          | Unit   | Rp36.391.000 | Rp43.401.000 |

18. NUSA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | OPERASIONAL  | LAPANGAN     |
|-----|---------------------|--------|--------------|--------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)          | (5)          |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | Unit   | Rp39.349.000 | Rp40.946.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | Unit   | Rp39.253.000 | Rp39.397.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | Unit   | Rp38.985.000 | Rp41.649.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | Unit   | Rp37.975.000 | Rp40.583.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | Unit   | Rp37.349.000 | Rp42.309.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | Unit   | Rp39.877.000 | Rp42.885.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | Unit   | Rp37.116.000 | Rp36.670.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | Unit   | Rp36.558.000 | Rp36.670.000 |
| 26. | GORONTALO           | Unit   | Rp41.341.000 | Rp39.514.000 |
| 27. | SULAWESI BARAT      | Unit   | Rp36.600.000 | Rp35.503.000 |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | Unit   | Rp39.997.000 | Rp39.121.000 |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | Unit   | Rp39.205.000 | Rp44.358.000 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | Unit   | Rp38.775.000 | Rp38.184.000 |
| 31. | MALUKU              | Unit   | Rp40.950.000 | Rp41.000.000 |
| 32. | MALUKU UTARA        | Unit   | Rp41.638.000 | Rp41.000.000 |
| 33. | P A P U A           | Unit   | Rp40.336.000 | Rp50.095.000 |
| 34. | PAPUA BARAT         | Unit   | Rp44.401.000 | Rp48.108.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA    | Unit   | Rp44.401.000 | Rp48.108.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH        | Unit   | Rp40.336.000 | Rp50.095.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN       | Unit   | Rp40.336.000 | Rp50.095.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN    | Unit   | Rp40.336.000 | Rp50.095.000 |

TABEL 1.12 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

**TABEL 1.12  
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI**

| NO. | URAIAN                       | SATUAN | BESARAN       |
|-----|------------------------------|--------|---------------|
| (1) | (2)                          | (3)    | (4)           |
| 1.  | Pejabat Eselon I             | Unit   | Rp966.804.000 |
| 2.  | Pejabat Eselon II            | Unit   | Rp746.110.000 |
| 3.  | Kendaraan Operasional Kantor | Unit   | Rp430.080.000 |
| 4.  | Kendaraan Roda Dua           | Unit   | Rp28.000.000  |

**Keterangan:**

OJ : Orang/Jam  
OH : Orang/Hari  
OB : Orang/Bulan  
OP : Orang/Paket  
OK : Orang/Kegiatan  
Oter : Orang/Terbitan  
OJP : Orang/Jam Pelajaran

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI  
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN  
DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
  - a. Satuan biaya tiket pesawat;
  - b. Satuan biaya taksi;
  - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*);
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

**1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

**TABEL 2.1 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**TABEL 2.1**  
**HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU**  
**PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

| NO. | URAIAN                   | SATUAN | BESARAN     |
|-----|--------------------------|--------|-------------|
| 1.  | Honorarium Narasumber    | OJ     | Rp1.700.000 |
| 2.  | Honorarium Moderator     | OK     | Rp1.000.000 |
| 3.  | Honorarium Pembawa Acara | OK     | Rp750.000   |

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

**2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

**2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

**TABEL 2.2**  
**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**  
**PERGI PULANG (PP)**

| NO. | KOTA    |                | SATUAN BIAYA TIKET |             |
|-----|---------|----------------|--------------------|-------------|
|     | ASAL    | TUJUAN         | BISNIS             | EKONOMI     |
| (1) | (2)     | (3)            | (4)                | (5)         |
| 1.  | JAKARTA | AMBON          | Rp13.285.000       | Rp7.081.000 |
| 2.  | JAKARTA | BALIKPAPAN     | Rp7.412.000        | Rp3.797.000 |
| 3.  | JAKARTA | BANDA ACEH     | Rp7.519.000        | Rp4.492.000 |
| 4.  | JAKARTA | BANDAR LAMPUNG | Rp2.407.000        | Rp1.583.000 |
| 5.  | JAKARTA | BANJARMASIN    | Rp5.252.000        | Rp2.995.000 |
| 6.  | JAKARTA | BATAM          | Rp4.867.000        | Rp2.888.000 |
| 7.  | JAKARTA | BENGKULU       | Rp4.364.000        | Rp2.621.000 |
| 8.  | JAKARTA | BIAK           | Rp14.065.000       | Rp7.519.000 |
| 9.  | JAKARTA | DENPASAR       | Rp5.305.000        | Rp3.262.000 |
| 10. | JAKARTA | GORONTALO      | Rp7.231.000        | Rp4.824.000 |

11. JAKARTA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

| NO. | KOTA       |                | SATUAN BIAYA TIKET |              |
|-----|------------|----------------|--------------------|--------------|
|     | ASAL       | TUJUAN         | BISNIS             | EKONOMI      |
| 11. | JAKARTA    | JAMBI          | Rp4.065.000        | Rp2.460.000  |
| 12. | JAKARTA    | JAYAPURA       | Rp14.568.000       | Rp8.193.000  |
| 13. | JAKARTA    | YOGYAKARTA     | Rp4.107.000        | Rp2.268.000  |
| 14. | JAKARTA    | KENDARI        | Rp7.658.000        | Rp4.182.000  |
| 15. | JAKARTA    | KUPANG         | Rp9.413.000        | Rp5.081.000  |
| 16. | JAKARTA    | MAKASSAR       | Rp7.444.000        | Rp3.829.000  |
| 17. | JAKARTA    | MALANG         | Rp4.599.000        | Rp2.695.000  |
| 18. | JAKARTA    | MAMUJU         | Rp7.295.000        | Rp4.867.000  |
| 19. | JAKARTA    | MANADO         | Rp10.824.000       | Rp5.102.000  |
| 20. | JAKARTA    | MANOKWARI      | Rp16.226.000       | Rp10.824.000 |
| 21. | JAKARTA    | MATARAM        | Rp5.316.000        | Rp3.230.000  |
| 22. | JAKARTA    | MEDAN          | Rp7.252.000        | Rp3.808.000  |
| 23. | JAKARTA    | PADANG         | Rp5.530.000        | Rp2.952.000  |
| 24. | JAKARTA    | PALANGKARAYA   | Rp4.984.000        | Rp2.984.000  |
| 25. | JAKARTA    | PALEMBANG      | Rp3.861.000        | Rp2.268.000  |
| 26. | JAKARTA    | PALU           | Rp9.348.000        | Rp5.113.000  |
| 27. | JAKARTA    | PANGKAL PINANG | Rp3.412.000        | Rp2.139.000  |
| 28. | JAKARTA    | PEKANBARU      | Rp5.583.000        | Rp3.016.000  |
| 29. | JAKARTA    | PONTIANAK      | Rp4.353.000        | Rp2.781.000  |
| 30. | JAKARTA    | SEMARANG       | Rp3.861.000        | Rp2.182.000  |
| 31. | JAKARTA    | SOLO           | Rp3.861.000        | Rp2.342.000  |
| 32. | JAKARTA    | SURABAYA       | Rp5.466.000        | Rp2.674.000  |
| 33. | JAKARTA    | TERNATE        | Rp10.001.000       | Rp6.664.000  |
| 34. | JAKARTA    | TIMIKA         | Rp13.830.000       | Rp7.487.000  |
| 35. | JAKARTA    | TANJUNG SELOR  | Rp7.424.000        | Rp4.057.000  |
| 36. | AMBON      | DENPASAR       | Rp8.054.000        | Rp4.471.000  |
| 37. | AMBON      | JAYAPURA       | Rp7.434.000        | Rp4.161.000  |
| 38. | AMBON      | KENDARI        | Rp4.824.000        | Rp2.856.000  |
| 39. | AMBON      | MAKASSAR       | Rp6.022.000        | Rp3.455.000  |
| 40. | AMBON      | MANOKWARI      | Rp5.177.000        | Rp3.027.000  |
| 41. | AMBON      | PALU           | Rp6.140.000        | Rp3.508.000  |
| 42. | AMBON      | SORONG         | Rp3.637.000        | Rp2.257.000  |
| 43. | AMBON      | SURABAYA       | Rp8.803.000        | Rp4.845.000  |
| 44. | AMBON      | TERNATE        | Rp4.022.000        | Rp2.449.000  |
| 45. | BALIKPAPAN | BANDA ACEH     | Rp12.739.000       | Rp6.749.000  |
| 46. | BALIKPAPAN | BATAM          | Rp10.354.000       | Rp5.305.000  |
| 47. | BALIKPAPAN | DENPASAR       | Rp10.739.000       | Rp5.648.000  |
| 48. | BALIKPAPAN | JAYAPURA       | Rp19.071.000       | Rp10.086.000 |

49. BALIKPAPAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

| NO. | KOTA           |              | SATUAN BIAYA TIKET |              |
|-----|----------------|--------------|--------------------|--------------|
|     | ASAL           | TUJUAN       | BISNIS             | EKONOMI      |
| 49. | BALIKPAPAN     | YOGYAKARTA   | Rp9.669.000        | Rp4.749.000  |
| 50. | BALIKPAPAN     | MAKASSAR     | Rp12.664.000       | Rp6.150.000  |
| 51. | BALIKPAPAN     | MANADO       | Rp15.702.000       | Rp7.295.000  |
| 52. | BALIKPAPAN     | MEDAN        | Rp12.493.000       | Rp6.140.000  |
| 53. | BALIKPAPAN     | PADANG       | Rp10.942.000       | Rp5.369.000  |
| 54. | BALIKPAPAN     | PALEMBANG    | Rp9.445.000        | Rp4.749.000  |
| 55. | BALIKPAPAN     | PEKANBARU    | Rp10.996.000       | Rp5.423.000  |
| 56. | BALIKPAPAN     | SEMARANG     | Rp9.445.000        | Rp4.674.000  |
| 57. | BALIKPAPAN     | SOLO         | Rp9.445.000        | Rp4.813.000  |
| 58. | BALIKPAPAN     | SURABAYA     | Rp10.889.000       | Rp5.113.000  |
| 59. | BALIKPAPAN     | TIMIKA       | Rp18.408.000       | Rp9.445.000  |
| 60. | BANDA ACEH     | DENPASAR     | Rp10.835.000       | Rp6.279.000  |
| 61. | BANDA ACEH     | JAYAPURA     | Rp19.167.000       | Rp10.717.000 |
| 62. | BANDA ACEH     | YOGYAKARTA   | Rp9.765.000        | Rp5.380.000  |
| 63. | BANDA ACEH     | MAKASSAR     | Rp12.760.000       | Rp6.781.000  |
| 64. | BANDA ACEH     | MANADO       | Rp15.798.000       | Rp7.926.000  |
| 65. | BANDA ACEH     | PONTIANAK    | Rp9.990.000        | Rp5.840.000  |
| 66. | BANDA ACEH     | SEMARANG     | Rp9.530.000        | Rp5.305.000  |
| 67. | BANDA ACEH     | SOLO         | Rp9.530.000        | Rp5.444.000  |
| 68. | BANDA ACEH     | SURABAYA     | Rp10.985.000       | Rp5.744.000  |
| 69. | BANDA ACEH     | TIMIKA       | Rp18.504.000       | Rp10.076.000 |
| 70. | BANDAR LAMPUNG | BALIKPAPAN   | Rp8.129.000        | Rp4.129.000  |
| 71. | BANDAR LAMPUNG | BANDA ACEH   | Rp8.225.000        | Rp4.760.000  |
| 72. | BANDAR LAMPUNG | BANJARMASIN  | Rp6.193.000        | Rp3.412.000  |
| 73. | BANDAR LAMPUNG | BATAM        | Rp5.840.000        | Rp3.316.000  |
| 74. | BANDAR LAMPUNG | BIAK         | Rp14.119.000       | Rp7.487.000  |
| 75. | BANDAR LAMPUNG | DENPASAR     | Rp6.236.000        | Rp3.647.000  |
| 76. | BANDAR LAMPUNG | JAYAPURA     | Rp14.568.000       | Rp8.097.000  |
| 77. | BANDAR LAMPUNG | YOGYAKARTA   | Rp5.155.000        | Rp2.760.000  |
| 78. | BANDAR LAMPUNG | KENDARI      | Rp8.354.000        | Rp4.482.000  |
| 79. | BANDAR LAMPUNG | MAKASSAR     | Rp8.161.000        | Rp4.161.000  |
| 80. | BANDAR LAMPUNG | MALANG       | Rp5.594.000        | Rp3.134.000  |
| 81. | BANDAR LAMPUNG | MANADO       | Rp11.199.000       | Rp5.305.000  |
| 82. | BANDAR LAMPUNG | MATARAM      | Rp6.246.000        | Rp3.626.000  |
| 83. | BANDAR LAMPUNG | MEDAN        | Rp7.979.000        | Rp4.150.000  |
| 84. | BANDAR LAMPUNG | PADANG       | Rp6.439.000        | Rp3.380.000  |
| 85. | BANDAR LAMPUNG | PALANGKARAYA | Rp5.947.000        | Rp3.401.000  |
| 86. | BANDAR LAMPUNG | PALEMBANG    | Rp4.931.000        | Rp2.760.000  |

87. BANDAR ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

| NO.  | KOTA           |                | SATUAN BIAYA TIKET |             |
|------|----------------|----------------|--------------------|-------------|
|      | ASAL           | TUJUAN         | BISNIS             | EKONOMI     |
| 87.  | BANDAR LAMPUNG | PEKANBARU      | Rp6.482.000        | Rp3.433.000 |
| 88.  | BANDAR LAMPUNG | PONTIANAK      | Rp5.380.000        | Rp3.220.000 |
| 89.  | BANDAR LAMPUNG | SEMARANG       | Rp4.931.000        | Rp2.685.000 |
| 90.  | BANDAR LAMPUNG | SOLO           | Rp4.931.000        | Rp2.824.000 |
| 91.  | BANDAR LAMPUNG | SURABAYA       | Rp6.386.000        | Rp3.123.000 |
| 92.  | BANDAR LAMPUNG | TIMIKA         | Rp13.905.000       | Rp7.455.000 |
| 93.  | BANDUNG        | BATAM          | Rp6.289.000        | Rp3.583.000 |
| 94.  | BANDUNG        | DENPASAR       | Rp5.626.000        | Rp3.252.000 |
| 95.  | BANDUNG        | JAMBI          | Rp5.006.000        | Rp2.941.000 |
| 96.  | BANDUNG        | YOGYAKARTA     | Rp3.369.000        | Rp2.129.000 |
| 97.  | BANDUNG        | PADANG         | Rp6.129.000        | Rp3.508.000 |
| 98.  | BANDUNG        | PALEMBANG      | Rp4.385.000        | Rp2.631.000 |
| 99.  | BANDUNG        | PANGKAL PINANG | Rp4.599.000        | Rp2.738.000 |
| 100. | BANDUNG        | PEKANBARU      | Rp6.525.000        | Rp3.701.000 |
| 101. | BANDUNG        | SEMARANG       | Rp3.027.000        | Rp1.957.000 |
| 102. | BANDUNG        | SOLO           | Rp3.647.000        | Rp2.268.000 |
| 103. | BANDUNG        | SURABAYA       | Rp4.824.000        | Rp2.856.000 |
| 104. | BANDUNG        | TANJUNG PANDAN | Rp4.439.000        | Rp2.663.000 |
| 105. | BANJARMASIN    | BANDA ACEH     | Rp10.792.000       | Rp6.022.000 |
| 106. | BANJARMASIN    | BATAM          | Rp8.407.000        | Rp4.578.000 |
| 107. | BANJARMASIN    | BIAK           | Rp16.686.000       | Rp8.749.000 |
| 108. | BANJARMASIN    | DENPASAR       | Rp8.792.000        | Rp4.920.000 |
| 109. | BANJARMASIN    | JAYAPURA       | Rp17.135.000       | Rp9.359.000 |
| 110. | BANJARMASIN    | YOGYAKARTA     | Rp7.723.000        | Rp4.022.000 |
| 111. | BANJARMASIN    | MEDAN          | Rp10.546.000       | Rp5.412.000 |
| 112. | BANJARMASIN    | PADANG         | Rp9.006.000        | Rp4.642.000 |
| 113. | BANJARMASIN    | PALEMBANG      | Rp7.498.000        | Rp4.022.000 |
| 114. | BANJARMASIN    | PEKANBARU      | Rp9.049.000        | Rp4.696.000 |
| 115. | BANJARMASIN    | SEMARANG       | Rp7.498.000        | Rp3.958.000 |
| 116. | BANJARMASIN    | SOLO           | Rp7.498.000        | Rp4.097.000 |
| 117. | BANJARMASIN    | SURABAYA       | Rp8.942.000        | Rp4.385.000 |
| 118. | BANJARMASIN    | TIMIKA         | Rp16.472.000       | Rp8.717.000 |
| 119. | BATAM          | BANDA ACEH     | Rp10.439.000       | Rp5.936.000 |
| 120. | BATAM          | DENPASAR       | Rp8.450.000        | Rp4.824.000 |
| 121. | BATAM          | JAYAPURA       | Rp16.782.000       | Rp9.263.000 |
| 122. | BATAM          | YOGYAKARTA     | Rp7.370.000        | Rp3.936.000 |
| 123. | BATAM          | MAKASSAR       | Rp10.375.000       | Rp5.337.000 |
| 124. | BATAM          | MANADO         | Rp13.413.000       | Rp6.482.000 |

125. BATAM . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

| NO.  | KOTA     |              | SATUAN BIAYA TIKET |              |
|------|----------|--------------|--------------------|--------------|
|      | ASAL     | TUJUAN       | BISNIS             | EKONOMI      |
| 125. | BATAM    | MEDAN        | Rp10.193.000       | Rp5.316.000  |
| 126. | BATAM    | PADANG       | Rp8.653.000        | Rp4.546.000  |
| 127. | BATAM    | PALEMBANG    | Rp7.145.000        | Rp3.936.000  |
| 128. | BATAM    | PEKANBARU    | Rp8.707.000        | Rp4.599.000  |
| 129. | BATAM    | PONTIANAK    | Rp7.594.000        | Rp4.396.000  |
| 130. | BATAM    | SEMARANG     | Rp7.145.000        | Rp3.861.000  |
| 131. | BATAM    | SOLO         | Rp7.145.000        | Rp4.000.000  |
| 132. | BATAM    | SURABAYA     | Rp8.600.000        | Rp4.300.000  |
| 133. | BATAM    | TIMIKA       | Rp16.119.000       | Rp8.621.000  |
| 134. | BENGKULU | PALEMBANG    | Rp2.899.000        | Rp1.893.000  |
| 135. | BIAK     | BALIKPAPAN   | Rp18.622.000       | Rp9.477.000  |
| 136. | BIAK     | BANDA ACEH   | Rp18.718.000       | Rp10.108.000 |
| 137. | BIAK     | BATAM        | Rp16.333.000       | Rp8.664.000  |
| 138. | BIAK     | DENPASAR     | Rp16.729.000       | Rp8.995.000  |
| 139. | BIAK     | JAYAPURA     | Rp3.615.000        | Rp2.321.000  |
| 140. | BIAK     | YOGYAKARTA   | Rp15.648.000       | Rp8.108.000  |
| 141. | BIAK     | MANADO       | Rp11.734.000       | Rp6.353.000  |
| 142. | BIAK     | MEDAN        | Rp18.472.000       | Rp9.498.000  |
| 143. | BIAK     | PADANG       | Rp16.932.000       | Rp8.728.000  |
| 144. | BIAK     | PALEMBANG    | Rp15.424.000       | Rp8.108.000  |
| 145. | BIAK     | PEKANBARU    | Rp16.985.000       | Rp8.781.000  |
| 146. | BIAK     | PONTIANAK    | Rp15.873.000       | Rp8.568.000  |
| 147. | BIAK     | SURABAYA     | Rp12.782.000       | Rp7.081.000  |
| 148. | BIAK     | TIMIKA       | Rp5.808.000        | Rp3.444.000  |
| 149. | DENPASAR | JAYAPURA     | Rp11.680.000       | Rp6.845.000  |
| 150. | DENPASAR | KUPANG       | Rp5.091.000        | Rp2.952.000  |
| 151. | DENPASAR | MAKASSAR     | Rp4.182.000        | Rp2.631.000  |
| 152. | DENPASAR | MANADO       | Rp7.851.000        | Rp4.278.000  |
| 153. | DENPASAR | MATARAM      | Rp1.840.000        | Rp1.390.000  |
| 154. | DENPASAR | MEDAN        | Rp10.589.000       | Rp5.658.000  |
| 155. | DENPASAR | PADANG       | Rp9.049.000        | Rp4.888.000  |
| 156. | DENPASAR | PALANGKARAYA | Rp8.557.000        | Rp4.909.000  |
| 157. | DENPASAR | PALEMBANG    | Rp7.541.000        | Rp4.278.000  |
| 158. | DENPASAR | PEKANBARU    | Rp9.092.000        | Rp4.942.000  |
| 159. | DENPASAR | PONTIANAK    | Rp7.990.000        | Rp4.738.000  |
| 160. | DENPASAR | TIMIKA       | Rp10.140.000       | Rp6.129.000  |
| 161. | JAMBI    | BALIKPAPAN   | Rp7.733.000        | Rp4.407.000  |
| 162. | JAMBI    | BANJARMASIN  | Rp7.690.000        | Rp4.193.000  |

163. JAMBI . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

| NO.  | KOTA       |              | SATUAN BIAYA TIKET |              |
|------|------------|--------------|--------------------|--------------|
|      | ASAL       | TUJUAN       | BISNIS             | EKONOMI      |
| 163. | JAMBI      | DENPASAR     | Rp7.733.000        | Rp4.439.000  |
| 164. | JAMBI      | YOGYAKARTA   | Rp6.653.000        | Rp3.551.000  |
| 165. | JAMBI      | KUPANG       | Rp11.434.000       | Rp6.075.000  |
| 166. | JAMBI      | MAKASSAR     | Rp9.659.000        | Rp4.952.000  |
| 167. | JAMBI      | MALANG       | Rp7.091.000        | Rp3.925.000  |
| 168. | JAMBI      | MANADO       | Rp12.707.000       | Rp6.097.000  |
| 169. | JAMBI      | PALANGKARAYA | Rp7.444.000        | Rp4.193.000  |
| 170. | JAMBI      | PONTIANAK    | Rp6.878.000        | Rp4.011.000  |
| 171. | JAMBI      | SEMARANG     | Rp6.428.000        | Rp3.476.000  |
| 172. | JAMBI      | SOLO         | Rp6.428.000        | Rp3.615.000  |
| 173. | JAMBI      | SURABAYA     | Rp7.883.000        | Rp3.915.000  |
| 174. | JAYAPURA   | YOGYAKARTA   | Rp13.274.000       | Rp7.690.000  |
| 175. | JAYAPURA   | MANADO       | Rp22.109.000       | Rp11.263.000 |
| 176. | JAYAPURA   | MEDAN        | Rp18.932.000       | Rp10.097.000 |
| 177. | JAYAPURA   | PADANG       | Rp17.381.000       | Rp9.327.000  |
| 178. | JAYAPURA   | PALEMBANG    | Rp15.873.000       | Rp8.717.000  |
| 179. | JAYAPURA   | PEKANBARU    | Rp17.435.000       | Rp9.380.000  |
| 180. | JAYAPURA   | PONTIANAK    | Rp16.322.000       | Rp9.177.000  |
| 181. | JAYAPURA   | TIMIKA       | Rp3.615.000        | Rp2.289.000  |
| 182. | YOGYAKARTA | DENPASAR     | Rp3.861.000        | Rp2.481.000  |
| 183. | YOGYAKARTA | MAKASSAR     | Rp6.525.000        | Rp3.893.000  |
| 184. | YOGYAKARTA | MANADO       | Rp10.536.000       | Rp5.722.000  |
| 185. | YOGYAKARTA | MEDAN        | Rp9.519.000        | Rp4.770.000  |
| 186. | YOGYAKARTA | PADANG       | Rp7.969.000        | Rp4.000.000  |
| 187. | YOGYAKARTA | PALEMBANG    | Rp6.460.000        | Rp3.380.000  |
| 188. | YOGYAKARTA | PEKANBARU    | Rp8.022.000        | Rp4.054.000  |
| 189. | YOGYAKARTA | PONTIANAK    | Rp6.910.000        | Rp3.840.000  |
| 190. | YOGYAKARTA | TIMIKA       | Rp11.894.000       | Rp7.038.000  |
| 191. | KENDARI    | BANDA ACEH   | Rp12.953.000       | Rp7.102.000  |
| 192. | KENDARI    | BATAM        | Rp10.568.000       | Rp5.658.000  |
| 193. | KENDARI    | DENPASAR     | Rp5.455.000        | Rp3.273.000  |
| 194. | KENDARI    | YOGYAKARTA   | Rp8.129.000        | Rp4.706.000  |
| 195. | KENDARI    | PADANG       | Rp11.167.000       | Rp5.722.000  |
| 196. | KENDARI    | PALEMBANG    | Rp9.659.000        | Rp5.102.000  |
| 197. | KENDARI    | PEKANBARU    | Rp11.220.000       | Rp5.776.000  |
| 198. | KENDARI    | SEMARANG     | Rp9.659.000        | Rp5.027.000  |
| 199. | KENDARI    | SOLO         | Rp9.659.000        | Rp5.166.000  |
| 200. | KENDARI    | SURABAYA     | Rp11.103.000       | Rp5.466.000  |

201. KENDARI . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

| NO.  | KOTA     |              | SATUAN BIAYA TIKET |             |
|------|----------|--------------|--------------------|-------------|
|      | ASAL     | TUJUAN       | BISNIS             | EKONOMI     |
| 201. | KENDARI  | TIMIKA       | Rp18.633.000       | Rp9.798.000 |
| 202. | KUPANG   | JAYAPURA     | Rp14.386.000       | Rp8.108.000 |
| 203. | KUPANG   | YOGYAKARTA   | Rp7.348.000        | Rp4.182.000 |
| 204. | KUPANG   | MAKASSAR     | Rp7.637.000        | Rp4.311.000 |
| 205. | KUPANG   | MANADO       | Rp11.648.000       | Rp6.140.000 |
| 206. | KUPANG   | SURABAYA     | Rp6.749.000        | Rp3.722.000 |
| 207. | MAKASSAR | BIAK         | Rp8.493.000        | Rp4.931.000 |
| 208. | MAKASSAR | JAYAPURA     | Rp10.193.000       | Rp5.787.000 |
| 209. | MAKASSAR | KENDARI      | Rp2.663.000        | Rp1.786.000 |
| 210. | MAKASSAR | MANADO       | Rp5.327.000        | Rp2.909.000 |
| 211. | MAKASSAR | TIMIKA       | Rp11.723.000       | Rp6.567.000 |
| 212. | MALANG   | BALIKPAPAN   | Rp10.108.000       | Rp5.134.000 |
| 213. | MALANG   | BANDA ACEH   | Rp10.204.000       | Rp5.765.000 |
| 214. | MALANG   | BANJARMASIN  | Rp8.161.000        | Rp4.407.000 |
| 215. | MALANG   | BATAM        | Rp7.819.000        | Rp4.311.000 |
| 216. | MALANG   | BIAK         | Rp16.087.000       | Rp8.482.000 |
| 217. | MALANG   | JAYAPURA     | Rp16.536.000       | Rp9.092.000 |
| 218. | MALANG   | KENDARI      | Rp10.322.000       | Rp5.487.000 |
| 219. | MALANG   | MAKASSAR     | Rp10.129.000       | Rp5.166.000 |
| 220. | MALANG   | MANADO       | Rp13.167.000       | Rp6.311.000 |
| 221. | MALANG   | MEDAN        | Rp9.958.000        | Rp5.145.000 |
| 222. | MALANG   | PADANG       | Rp8.418.000        | Rp4.385.000 |
| 223. | MALANG   | PALANGKARAYA | Rp7.915.000        | Rp4.407.000 |
| 224. | MALANG   | PALEMBANG    | Rp6.899.000        | Rp3.765.000 |
| 225. | MALANG   | PEKANBARU    | Rp8.461.000        | Rp4.439.000 |
| 226. | MALANG   | TIMIKA       | Rp15.873.000       | Rp8.461.000 |
| 227. | MANADO   | MEDAN        | Rp15.552.000       | Rp7.316.000 |
| 228. | MANADO   | PADANG       | Rp14.012.000       | Rp6.546.000 |
| 229. | MANADO   | PALEMBANG    | Rp12.504.000       | Rp5.926.000 |
| 230. | MANADO   | PEKANBARU    | Rp14.055.000       | Rp6.599.000 |
| 231. | MANADO   | PONTIANAK    | Rp12.953.000       | Rp6.396.000 |
| 232. | MANADO   | SEMARANG     | Rp12.504.000       | Rp5.851.000 |
| 233. | MANADO   | SOLO         | Rp12.504.000       | Rp5.990.000 |
| 234. | MANADO   | SURABAYA     | Rp9.937.000        | Rp5.262.000 |
| 235. | MANADO   | TIMIKA       | Rp16.183.000       | Rp8.995.000 |
| 236. | MATARAM  | BALIKPAPAN   | Rp10.750.000       | Rp5.615.000 |
| 237. | MATARAM  | BANDA ACEH   | Rp10.846.000       | Rp6.246.000 |
| 238. | MATARAM  | BANJARMASIN  | Rp8.803.000        | Rp4.888.000 |

239. MATARAM . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

| NO.  | KOTA         |            | SATUAN BIAYA TIKET |             |
|------|--------------|------------|--------------------|-------------|
|      | ASAL         | TUJUAN     | BISNIS             | EKONOMI     |
| 239. | MATARAM      | BATAM      | Rp8.461.000        | Rp4.803.000 |
| 240. | MATARAM      | BIAK       | Rp11.552.000       | Rp6.546.000 |
| 241. | MATARAM      | JAYAPURA   | Rp13.092.000       | Rp7.327.000 |
| 242. | MATARAM      | YOGYAKARTA | Rp4.417.000        | Rp2.781.000 |
| 243. | MATARAM      | MAKASSAR   | Rp4.717.000        | Rp2.909.000 |
| 244. | MATARAM      | MANADO     | Rp8.717.000        | Rp4.738.000 |
| 245. | MATARAM      | MEDAN      | Rp10.600.000       | Rp5.637.000 |
| 246. | MATARAM      | PADANG     | Rp9.060.000        | Rp4.867.000 |
| 247. | MATARAM      | PALEMBANG  | Rp7.551.000        | Rp4.246.000 |
| 248. | MATARAM      | PEKANBARU  | Rp9.102.000        | Rp4.909.000 |
| 249. | MATARAM      | PONTIANAK  | Rp8.001.000        | Rp4.706.000 |
| 250. | MATARAM      | SURABAYA   | Rp3.829.000        | Rp2.321.000 |
| 251. | MEDAN        | BANDA ACEH | Rp3.466.000        | Rp2.193.000 |
| 252. | MEDAN        | MAKASSAR   | Rp12.514.000       | Rp6.172.000 |
| 253. | MEDAN        | PONTIANAK  | Rp9.733.000        | Rp5.230.000 |
| 254. | MEDAN        | SEMARANG   | Rp9.284.000        | Rp4.696.000 |
| 255. | MEDAN        | SOLO       | Rp9.284.000        | Rp4.835.000 |
| 256. | MEDAN        | SURABAYA   | Rp10.739.000       | Rp5.134.000 |
| 257. | MEDAN        | TIMIKA     | Rp18.258.000       | Rp9.455.000 |
| 258. | PADANG       | MAKASSAR   | Rp10.974.000       | Rp5.402.000 |
| 259. | PADANG       | PONTIANAK  | Rp8.193.000        | Rp4.460.000 |
| 260. | PADANG       | SEMARANG   | Rp7.744.000        | Rp3.925.000 |
| 261. | PADANG       | SOLO       | Rp7.744.000        | Rp4.065.000 |
| 262. | PADANG       | SURABAYA   | Rp9.199.000        | Rp4.364.000 |
| 263. | PADANG       | TIMIKA     | Rp16.718.000       | Rp8.685.000 |
| 264. | PALANGKARAYA | BANDA ACEH | Rp10.546.000       | Rp6.022.000 |
| 265. | PALANGKARAYA | BATAM      | Rp8.161.000        | Rp4.578.000 |
| 266. | PALANGKARAYA | YOGYAKARTA | Rp7.477.000        | Rp4.022.000 |
| 267. | PALANGKARAYA | MATARAM    | Rp8.557.000        | Rp4.888.000 |
| 268. | PALANGKARAYA | MEDAN      | Rp10.300.000       | Rp5.412.000 |
| 269. | PALANGKARAYA | PADANG     | Rp8.760.000        | Rp4.642.000 |
| 270. | PALANGKARAYA | PALEMBANG  | Rp7.252.000        | Rp4.022.000 |
| 271. | PALANGKARAYA | PEKANBARU  | Rp8.803.000        | Rp4.696.000 |
| 272. | PALANGKARAYA | SEMARANG   | Rp7.252.000        | Rp3.947.000 |
| 273. | PALANGKARAYA | SOLO       | Rp7.252.000        | Rp4.086.000 |
| 274. | PALANGKARAYA | SURABAYA   | Rp8.696.000        | Rp4.385.000 |
| 275. | PALEMBANG    | BALIKPAPAN | Rp9.894.000        | Rp5.220.000 |
| 276. | PALEMBANG    | MAKASSAR   | Rp9.466.000        | Rp4.781.000 |

277. PALEMBANG, ..



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

| NO.  | KOTA           |             | SATUAN BIAYA TIKET |             |
|------|----------------|-------------|--------------------|-------------|
|      | ASAL           | TUJUAN      | BISNIS             | EKONOMI     |
| 277. | PALEMBANG      | PONTIANAK   | Rp6.685.000        | Rp3.840.000 |
| 278. | PALEMBANG      | SEMARANG    | Rp6.236.000        | Rp3.305.000 |
| 279. | PALEMBANG      | SOLO        | Rp6.236.000        | Rp3.444.000 |
| 280. | PALEMBANG      | SURABAYA    | Rp7.690.000        | Rp3.744.000 |
| 281. | PALEMBANG      | TIMIKA      | Rp15.210.000       | Rp8.076.000 |
| 282. | PALU           | MAKASSAR    | Rp4.268.000        | Rp2.578.000 |
| 283. | PALU           | POSO        | Rp1.957.000        | Rp1.423.000 |
| 284. | PALU           | SORONG      | Rp6.878.000        | Rp3.883.000 |
| 285. | PALU           | SURABAYA    | Rp6.878.000        | Rp3.883.000 |
| 286. | PALU           | TOLI-TOLI   | Rp2.941.000        | Rp1.915.000 |
| 287. | PANGKAL PINANG | BALIKPAPAN  | Rp9.038.000        | Rp4.631.000 |
| 288. | PANGKAL PINANG | BANJARMASIN | Rp7.091.000        | Rp3.915.000 |
| 289. | PANGKAL PINANG | BATAM       | Rp6.739.000        | Rp3.818.000 |
| 290. | PANGKAL PINANG | YOGYAKARTA  | Rp6.065.000        | Rp3.262.000 |
| 291. | PANGKAL PINANG | MAKASSAR    | Rp9.060.000        | Rp4.663.000 |
| 292. | PANGKAL PINANG | MANADO      | Rp12.097.000       | Rp5.808.000 |
| 293. | PANGKAL PINANG | MEDAN       | Rp8.888.000        | Rp4.653.000 |
| 294. | PANGKAL PINANG | PADANG      | Rp7.337.000        | Rp3.883.000 |
| 295. | PANGKAL PINANG | PALEMBANG   | Rp5.829.000        | Rp3.262.000 |
| 296. | PANGKAL PINANG | PEKANBARU   | Rp7.391.000        | Rp3.936.000 |
| 297. | PANGKAL PINANG | PONTIANAK   | Rp6.279.000        | Rp3.733.000 |
| 298. | PANGKAL PINANG | SEMARANG    | Rp5.829.000        | Rp3.187.000 |
| 299. | PANGKAL PINANG | SOLO        | Rp5.829.000        | Rp3.326.000 |
| 300. | PANGKAL PINANG | SURABAYA    | Rp7.284.000        | Rp3.626.000 |
| 301. | PEKANBARU      | PONTIANAK   | Rp8.247.000        | Rp4.514.000 |
| 302. | PEKANBARU      | SEMARANG    | Rp7.797.000        | Rp3.979.000 |
| 303. | PEKANBARU      | SOLO        | Rp7.797.000        | Rp4.118.000 |
| 304. | PEKANBARU      | SURABAYA    | Rp9.241.000        | Rp4.407.000 |
| 305. | PEKANBARU      | TIMIKA      | Rp16.771.000       | Rp8.739.000 |
| 306. | PONTIANAK      | MAKASSAR    | Rp9.915.000        | Rp5.241.000 |
| 307. | PONTIANAK      | SEMARANG    | Rp6.685.000        | Rp3.765.000 |
| 308. | PONTIANAK      | SOLO        | Rp6.685.000        | Rp3.904.000 |
| 309. | PONTIANAK      | SURABAYA    | Rp8.140.000        | Rp4.204.000 |
| 310. | PONTIANAK      | TIMIKA      | Rp15.659.000       | Rp8.535.000 |
| 311. | SEMARANG       | MAKASSAR    | Rp9.466.000        | Rp4.706.000 |
| 312. | SOLO           | MAKASSAR    | Rp9.466.000        | Rp4.845.000 |
| 313. | SURABAYA       | DENPASAR    | Rp3.198.000        | Rp1.979.000 |
| 314. | SURABAYA       | JAYAPURA    | Rp12.675.000       | Rp7.231.000 |

315. SURABAYA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

| NO.  | KOTA     |          | SATUAN BIAYA TIKET |             |
|------|----------|----------|--------------------|-------------|
|      | ASAL     | TUJUAN   | BISNIS             | EKONOMI     |
| 315. | SURABAYA | MAKASSAR | Rp5.936.000        | Rp3.433.000 |
| 316. | SURABAYA | TIMIKA   | Rp11.295.000       | Rp6.589.000 |

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Kepala Daerah dapat menetapkan standar satuan harga tiket pesawat untuk rute atau tujuan yang belum diatur dalam tabel di atas melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

**2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

- a. keberangkatan
  - 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
  - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- b. kepulangan
  - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
  - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**TABEL 2.3**  
**SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

| NO. | PROVINSI            | SATUAN     | BESARAN   |
|-----|---------------------|------------|-----------|
| (1) | (2)                 | (3)        | (4)       |
| 1.  | ACEH                | Orang/Kali | Rp127.000 |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | Orang/Kali | Rp308.000 |
| 3.  | RIAU                | Orang/Kali | Rp101.000 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | Orang/Kali | Rp165.000 |
| 5.  | JAMBI               | Orang/Kali | Rp147.000 |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | Orang/Kali | Rp190.000 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | Orang/Kali | Rp179.000 |
| 8.  | LAMPUNG             | Orang/Kali | Rp168.000 |
| 9.  | BENGKULU            | Orang/Kali | Rp109.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | Orang/Kali | Rp97.000  |
| 11. | BANTEN              | Orang/Kali | Rp536.000 |
| 12. | JAWA BARAT          | Orang/Kali | Rp200.000 |
| 13. | DKI JAKARTA         | Orang/Kali | Rp256.000 |
| 14. | JAWA TENGAH         | Orang/Kali | Rp108.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | Orang/Kali | Rp267.000 |
| 16. | JAWA TIMUR          | Orang/Kali | Rp233.000 |
| 17. | BALI                | Orang/Kali | Rp227.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | Orang/Kali | Rp231.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/Kali | Rp116.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | Orang/Kali | Rp171.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | Orang/Kali | Rp134.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | Orang/Kali | Rp180.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | Orang/Kali | Rp533.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | Orang/Kali | Rp218.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | Orang/Kali | Rp138.000 |
| 26. | GORONTALO           | Orang/Kali | Rp265.000 |
| 27. | SULAWESI BARAT      | Orang/Kali | Rp313.000 |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | Orang/Kali | Rp187.000 |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | Orang/Kali | Rp165.000 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | Orang/Kali | Rp171.000 |
| 31. | MALUKU              | Orang/Kali | Rp288.000 |

32. MALUKU . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

| NO. | PROVINSI         | SATUAN     | BESARAN   |
|-----|------------------|------------|-----------|
| (1) | (2)              | (3)        | (4)       |
| 32. | MALUKU UTARA     | Orang/Kali | Rp215.000 |
| 33. | PAPUA            | Orang/Kali | Rp513.000 |
| 34. | PAPUA BARAT      | Orang/Kali | Rp236.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA | Orang/Kali | Rp236.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH     | Orang/Kali | Rp513.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN    | Orang/Kali | Rp513.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN | Orang/Kali | Rp513.000 |

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2, . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

**2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2. 4 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

**TABEL 2.4**  
**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE  
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

| NO.            | IBUKOTA<br>PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN   |
|----------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------|
| (1)            | (2)                 | (3)                       | (4)        | (5)       |
| ACEH           |                     |                           |            |           |
| 1.             | Banda Aceh          | Kab. Aceh Barat           | Orang/Kali | Rp275.000 |
| 2.             | Banda Aceh          | Kab. Aceh Barat Daya      | Orang/Kali | Rp298.000 |
| 3.             | Banda Aceh          | Kab. Aceh Besar           | Orang/Kali | Rp183.000 |
| 4.             | Banda Aceh          | Kab. Aceh Jaya            | Orang/Kali | Rp238.000 |
| 5.             | Banda Aceh          | Kab. Aceh Selatan         | Orang/Kali | Rp325.000 |
| 6.             | Banda Aceh          | Kab. Aceh Singkil         | Orang/Kali | Rp420.000 |
| 7.             | Banda Aceh          | Kab. Aceh Tamiang         | Orang/Kali | Rp315.000 |
| 8.             | Banda Aceh          | Kab. Aceh Tengah          | Orang/Kali | Rp293.000 |
| 9.             | Banda Aceh          | Kab. Aceh Tenggara        | Orang/Kali | Rp460.000 |
| 10.            | Banda Aceh          | Kab. Aceh Timur           | Orang/Kali | Rp289.000 |
| 11.            | Banda Aceh          | Kab. Aceh Utara           | Orang/Kali | Rp270.000 |
| 12.            | Banda Aceh          | Kab. Bener Meriah         | Orang/Kali | Rp278.000 |
| 13.            | Banda Aceh          | Kab. Bireuen              | Orang/Kali | Rp220.000 |
| 14.            | Banda Aceh          | Kab. Gayo Lues            | Orang/Kali | Rp370.000 |
| 15.            | Banda Aceh          | Kab. Nagan Raya           | Orang/Kali | Rp275.000 |
| 16.            | Banda Aceh          | Kab. Pidie                | Orang/Kali | Rp190.000 |
| 17.            | Banda Aceh          | Kab. Pidie Jaya           | Orang/Kali | Rp205.000 |
| 18.            | Banda Aceh          | Kota Langsa               | Orang/Kali | Rp301.000 |
| 19.            | Banda Aceh          | Kota Lhokseumawe          | Orang/Kali | Rp240.000 |
| 20.            | Banda Aceh          | Kota Subulussalam         | Orang/Kali | Rp400.000 |
| SUMATERA UTARA |                     |                           |            |           |
| 21.            | Medan               | Kab. Asahan               | Orang/Kali | Rp259.000 |
| 22.            | Medan               | Kab. Batubara             | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 23.            | Medan               | Kab. Dairi                | Orang/Kali | Rp270.000 |
| 24.            | Medan               | Kab. Deli Serdang         | Orang/Kali | Rp186.000 |
| 25.            | Medan               | Kab. Humbang Hasundutan   | Orang/Kali | Rp300.000 |
| 26.            | Medan               | Kab. Karo                 | Orang/Kali | Rp200.000 |
| 27.            | Medan               | Kab. Labuhan Batu         | Orang/Kali | Rp287.000 |
| 28.            | Medan               | Kab. Labuhan Batu Selatan | Orang/Kali | Rp360.000 |
| 29.            | Medan               | Kab. Labuhan Batu Utara   | Orang/Kali | Rp300.000 |
| 30.            | Medan               | Kab. Langkat              | Orang/Kali | Rp186.000 |
| 31.            | Medan               | Kab. Mandailing Natal     | Orang/Kali | Rp420.000 |
| 32.            | Medan               | Kab. Padang Lawas         | Orang/Kali | Rp420.000 |
| 33.            | Medan               | Kab. Padang Lawas Utara   | Orang/Kali | Rp420.000 |
| 34.            | Medan               | Kab. Pakpak Bharat        | Orang/Kali | Rp300.000 |

35. Medan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

| NO.            | IBUKOTA<br>PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN   |
|----------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------|
| (1)            | (2)                 | (3)                       | (4)        | (5)       |
| 35.            | Medan               | Kab. Samosir              | Orang/Kali | Rp330.000 |
| 36.            | Medan               | Kab. Serdang Bedagai      | Orang/Kali | Rp200.000 |
| 37.            | Medan               | Kab. Simalungun           | Orang/Kali | Rp264.000 |
| 38.            | Medan               | Kab. Tapanuli Selatan     | Orang/Kali | Rp328.000 |
| 39.            | Medan               | Kab. Tapanuli Tengah      | Orang/Kali | Rp345.000 |
| 40.            | Medan               | Kab. Tapanuli Utara       | Orang/Kali | Rp330.000 |
| 41.            | Medan               | Kab. Toba                 | Orang/Kali | Rp300.000 |
| 42.            | Medan               | Kota Binjai               | Orang/Kali | Rp180.000 |
| 43.            | Medan               | Kota Pematang Siantar     | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 44.            | Medan               | Kota Sibolga              | Orang/Kali | Rp345.000 |
| 45.            | Medan               | Kota Tanjung Balai        | Orang/Kali | Rp285.000 |
| 46.            | Medan               | Kota Tebing Tinggi        | Orang/Kali | Rp203.000 |
| RIAU           |                     |                           |            |           |
| 47.            | Pekanbaru           | Kab. Indragiri Hilir      | Orang/Kali | Rp380.000 |
| 48.            | Pekanbaru           | Kab. Indragiri Hulu       | Orang/Kali | Rp315.000 |
| 49.            | Pekanbaru           | Kab. Kampar               | Orang/Kali | Rp200.000 |
| 50.            | Pekanbaru           | Kab. Kuantan Singingi     | Orang/Kali | Rp300.000 |
| 51.            | Pekanbaru           | Kab. Pelalawan            | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 52.            | Pekanbaru           | Kab. Rokan Hilir          | Orang/Kali | Rp350.000 |
| 53.            | Pekanbaru           | Kab. Rokan Hulu           | Orang/Kali | Rp322.000 |
| 54.            | Pekanbaru           | Kab. Siak                 | Orang/Kali | Rp350.000 |
| 55.            | Pekanbaru           | Kota Dumai                | Orang/Kali | Rp400.000 |
| KEPULAUAN RIAU |                     |                           |            |           |
| 56.            | Tanjung Pinang      | Kab. Bintan               | Orang/Kali | Rp185.000 |
| JAMBI          |                     |                           |            |           |
| 57.            | Jambi               | Kab. Batanghari           | Orang/Kali | Rp175.000 |
| 58.            | Jambi               | Kab. Bungo                | Orang/Kali | Rp270.000 |
| 59.            | Jambi               | Kab. Kerinci              | Orang/Kali | Rp325.000 |
| 60.            | Jambi               | Kab. Merangin             | Orang/Kali | Rp260.000 |
| 61.            | Jambi               | Kab. Muaro Jambi          | Orang/Kali | Rp170.000 |
| 62.            | Jambi               | Kab. Sarolangun           | Orang/Kali | Rp241.000 |
| 63.            | Jambi               | Kab. Tanjung Jabung Barat | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 64.            | Jambi               | Kab. Tanjung Jabung Timur | Orang/Kali | Rp190.000 |
| 65.            | Jambi               | Kab. Tebo                 | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 66.            | Jambi               | Kota Sungai Penuh         | Orang/Kali | Rp308.000 |
| SUMATERA BARAT |                     |                           |            |           |
| 67.            | Padang              | Kab. Agam                 | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 68.            | Padang              | Kab. Dharmasraya          | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 69.            | Padang              | Kab. Lima Puluh Kota      | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 70.            | Padang              | Kab. Padang Pariaman      | Orang/Kali | Rp205.000 |

71. Padang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

| NO.              | IBUKOTA<br>PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN      | SATUAN     | BESARAN   |
|------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| (1)              | (2)                 | (3)                            | (4)        | (5)       |
| 71.              | Padang              | Kab. Pasaman                   | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 72.              | Padang              | Kab. Pasaman Barat             | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 73.              | Padang              | Kab. Pesisir Selatan           | Orang/Kali | Rp205.000 |
| 74.              | Padang              | Kab. Sijunjung                 | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 75.              | Padang              | Kab. Solok                     | Orang/Kali | Rp210.000 |
| 76.              | Padang              | Kab. Solok Selatan             | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 77.              | Padang              | Kab. Tanah Datar               | Orang/Kali | Rp220.000 |
| 78.              | Padang              | Kota Bukit Tinggi              | Orang/Kali | Rp215.000 |
| 79.              | Padang              | Kota Padang Panjang            | Orang/Kali | Rp210.000 |
| 80.              | Padang              | Kota Pariaman                  | Orang/Kali | Rp200.000 |
| 81.              | Padang              | Kota Payakumbuh                | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 82.              | Padang              | Kota Sawahlunto                | Orang/Kali | Rp215.000 |
| 83.              | Padang              | Kota Solok                     | Orang/Kali | Rp210.000 |
| SUMATERA SELATAN |                     |                                |            |           |
| 84.              | Palembang           | Kab. Banyuasin                 | Orang/Kali | Rp203.000 |
| 85.              | Palembang           | Kab. Empat Lawang              | Orang/Kali | Rp315.000 |
| 86.              | Palembang           | Kab. Lahat                     | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 87.              | Palembang           | Kab. Muara Enim                | Orang/Kali | Rp235.000 |
| 88.              | Palembang           | Kab. Musi Banyuasin            | Orang/Kali | Rp235.000 |
| 89.              | Palembang           | Kab. Musi Rawas                | Orang/Kali | Rp320.000 |
| 90.              | Palembang           | Kab. Musi Rawas Utara          | Orang/Kali | Rp325.000 |
| 91.              | Palembang           | Kab. Ogan Ilir                 | Orang/Kali | Rp205.000 |
| 92.              | Palembang           | Kab. Ogan Komering Ilir        | Orang/Kali | Rp205.000 |
| 93.              | Palembang           | Kab. Ogan Komering Ulu         | Orang/Kali | Rp248.000 |
| 94.              | Palembang           | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 95.              | Palembang           | Kab. Ogan Komering Ulu Timur   | Orang/Kali | Rp245.000 |
| 96.              | Palembang           | Kab. Pali                      | Orang/Kali | Rp265.000 |
| 97.              | Palembang           | Kota Lubuk Linggau             | Orang/Kali | Rp290.000 |
| 98.              | Palembang           | Kota Pagar Alam                | Orang/Kali | Rp280.000 |
| 99.              | Palembang           | Kota Prabumulih                | Orang/Kali | Rp205.000 |
| LAMPUNG          |                     |                                |            |           |
| 100.             | Bandar Lampung      | Kab. Lampung Barat             | Orang/Kali | Rp270.000 |
| 101.             | Bandar Lampung      | Kab. Lampung Selatan           | Orang/Kali | Rp234.000 |
| 102.             | Bandar Lampung      | Kab. Lampung Tengah            | Orang/Kali | Rp246.000 |
| 103.             | Bandar Lampung      | Kab. Lampung Timur             | Orang/Kali | Rp246.000 |
| 104.             | Bandar Lampung      | Kab. Lampung Utara             | Orang/Kali | Rp252.000 |
| 105.             | Bandar Lampung      | Kab. Mesuji                    | Orang/Kali | Rp276.000 |
| 106.             | Bandar Lampung      | Kab. Pesawaran                 | Orang/Kali | Rp216.000 |
| 107.             | Bandar Lampung      | Kab. Pesisir Barat             | Orang/Kali | Rp200.000 |
| 108.             | Bandar Lampung      | Kab. Pringsewu                 | Orang/Kali | Rp222.000 |

109. Bandar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

| NO.                    | IBUKOTA<br>PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN   |
|------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------|
| (1)                    | (2)                 | (3)                       | (4)        | (5)       |
| 109.                   | Bandar Lampung      | Kab. Tanggamus            | Orang/Kali | Rp240.000 |
| 110.                   | Bandar Lampung      | Kab. Tulang Bawang        | Orang/Kali | Rp252.000 |
| 111.                   | Bandar Lampung      | Kab. Tulang Bawang Barat  | Orang/Kali | Rp267.000 |
| 112.                   | Bandar Lampung      | Kab. Way Kanan            | Orang/Kali | Rp270.000 |
| 113.                   | Bandar Lampung      | Kota Metro                | Orang/Kali | Rp234.000 |
| <b>BENGKULU</b>        |                     |                           |            |           |
| 114.                   | Bengkulu            | Kab. Bengkulu Selatan     | Orang/Kali | Rp344.000 |
| 115.                   | Bengkulu            | Kab. Bengkulu Tengah      | Orang/Kali | Rp232.000 |
| 116.                   | Bengkulu            | Kab. Bengkulu Utara       | Orang/Kali | Rp313.000 |
| 117.                   | Bengkulu            | Kab. Kaur                 | Orang/Kali | Rp385.000 |
| 118.                   | Bengkulu            | Kab. Kepahiang            | Orang/Kali | Rp298.000 |
| 119.                   | Bengkulu            | Kab. Lebong               | Orang/Kali | Rp375.000 |
| 120.                   | Bengkulu            | Kab. Mukomuko             | Orang/Kali | Rp423.000 |
| 121.                   | Bengkulu            | Kab. Rejang Lebong        | Orang/Kali | Rp313.000 |
| 122.                   | Bengkulu            | Kab. Seluma               | Orang/Kali | Rp282.000 |
| <b>BANGKA BELITUNG</b> |                     |                           |            |           |
| 123.                   | Pangkalpinang       | Kab. Bangka               | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 124.                   | Pangkalpinang       | Kab. Bangka Barat         | Orang/Kali | Rp275.000 |
| 125.                   | Pangkalpinang       | Kab. Bangka Selatan       | Orang/Kali | Rp275.000 |
| 126.                   | Pangkalpinang       | Kab. Bangka Tengah        | Orang/Kali | Rp250.000 |
| <b>BANTEN</b>          |                     |                           |            |           |
| 127.                   | Serang              | Kab. Lebak                | Orang/Kali | Rp208.000 |
| 128.                   | Serang              | Kab. Pandeglang           | Orang/Kali | Rp138.000 |
| 129.                   | Serang              | Kab. Serang               | Orang/Kali | Rp160.000 |
| 130.                   | Serang              | Kab. Tangerang            | Orang/Kali | Rp254.000 |
| 131.                   | Serang              | Kota Cilegon              | Orang/Kali | Rp160.000 |
| 132.                   | Serang              | Kota Tangerang            | Orang/Kali | Rp313.000 |
| 133.                   | Serang              | Kota Tangerang Selatan    | Orang/Kali | Rp347.000 |
| <b>JAWA BARAT</b>      |                     |                           |            |           |
| 134.                   | Bandung             | Kab. Bandung              | Orang/Kali | Rp183.000 |
| 135.                   | Bandung             | Kab. Bandung Barat        | Orang/Kali | Rp275.000 |
| 136.                   | Bandung             | Kab. Bekasi               | Orang/Kali | Rp265.000 |
| 137.                   | Bandung             | Kab. Bogor                | Orang/Kali | Rp185.000 |
| 138.                   | Bandung             | Kab. Ciamis               | Orang/Kali | Rp245.000 |
| 139.                   | Bandung             | Kab. Cianjur              | Orang/Kali | Rp215.000 |
| 140.                   | Bandung             | Kab. Cirebon              | Orang/Kali | Rp280.000 |
| 141.                   | Bandung             | Kab. Garut                | Orang/Kali | Rp243.000 |
| 142.                   | Bandung             | Kab. Indramayu            | Orang/Kali | Rp275.000 |
| 143.                   | Bandung             | Kab. Karawang             | Orang/Kali | Rp248.000 |
| 144.                   | Bandung             | Kab. Kuningan             | Orang/Kali | Rp275.000 |

145. Bandung . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

| NO.         | IBUKOTA<br>PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN   |
|-------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------|
| (1)         | (2)                 | (3)                       | (4)        | (5)       |
| 145.        | Bandung             | Kab. Majalengka           | Orang/Kali | Rp235.000 |
| 146.        | Bandung             | Kab. Pangandaran          | Orang/Kali | Rp283.000 |
| 147.        | Bandung             | Kab. Purwakarta           | Orang/Kali | Rp218.000 |
| 148.        | Bandung             | Kab. Subang               | Orang/Kali | Rp208.000 |
| 149.        | Bandung             | Kab. Sukabumi             | Orang/Kali | Rp245.000 |
| 150.        | Bandung             | Kab. Sumedang             | Orang/Kali | Rp230.000 |
| 151.        | Bandung             | Kab. Tasikmalaya          | Orang/Kali | Rp245.000 |
| 152.        | Bandung             | Kota Banjar               | Orang/Kali | Rp283.000 |
| 153.        | Bandung             | Kota Bekasi               | Orang/Kali | Rp265.000 |
| 154.        | Bandung             | Kota Bogor                | Orang/Kali | Rp285.000 |
| 155.        | Bandung             | Kota Cimahi               | Orang/Kali | Rp168.000 |
| 156.        | Bandung             | Kota Cirebon              | Orang/Kali | Rp270.000 |
| 157.        | Bandung             | Kota Depok                | Orang/Kali | Rp275.000 |
| 158.        | Bandung             | Kota Sukabumi             | Orang/Kali | Rp226.000 |
| 159.        | Bandung             | Kota Tasikmalaya          | Orang/Kali | Rp245.000 |
| JAWA TENGAH |                     |                           |            |           |
| 160.        | Semarang            | Kab. Banjarnegara         | Orang/Kali | Rp260.000 |
| 161.        | Semarang            | Kab. Banyumas             | Orang/Kali | Rp257.000 |
| 162.        | Semarang            | Kab. Batang               | Orang/Kali | Rp240.000 |
| 163.        | Semarang            | Kab. Blora                | Orang/Kali | Rp270.000 |
| 164.        | Semarang            | Kab. Boyolali             | Orang/Kali | Rp240.000 |
| 165.        | Semarang            | Kab. Brebes               | Orang/Kali | Rp263.000 |
| 166.        | Semarang            | Kab. Cilacap              | Orang/Kali | Rp280.000 |
| 167.        | Semarang            | Kab. Demak                | Orang/Kali | Rp230.000 |
| 168.        | Semarang            | Kab. Grobogan             | Orang/Kali | Rp235.000 |
| 169.        | Semarang            | Kab. Jepara               | Orang/Kali | Rp240.000 |
| 170.        | Semarang            | Kab. Karanganyar          | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 171.        | Semarang            | Kab. Kebumen              | Orang/Kali | Rp260.000 |
| 172.        | Semarang            | Kab. Kendal               | Orang/Kali | Rp230.000 |
| 173.        | Semarang            | Kab. Klaten               | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 174.        | Semarang            | Kab. Kudus                | Orang/Kali | Rp235.000 |
| 175.        | Semarang            | Kab. Magelang             | Orang/Kali | Rp240.000 |
| 176.        | Semarang            | Kab. Pati                 | Orang/Kali | Rp240.000 |
| 177.        | Semarang            | Kab. Pekalongan           | Orang/Kali | Rp245.000 |
| 178.        | Semarang            | Kab. Pemalang             | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 179.        | Semarang            | Kab. Purbalingga          | Orang/Kali | Rp270.000 |
| 180.        | Semarang            | Kab. Purworejo            | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 181.        | Semarang            | Kab. Rembang              | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 182.        | Semarang            | Kab. Semarang             | Orang/Kali | Rp230.000 |
| 183.        | Semarang            | Kab. Sragen               | Orang/Kali | Rp250.000 |

184. Semarang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

| NO.             | IBUKOTA<br>PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN   |
|-----------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------|
| (1)             | (2)                 | (3)                       | (4)        | (5)       |
| 184.            | Semarang            | Kab. Sukoharjo            | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 185.            | Semarang            | Kab. Tegal                | Orang/Kali | Rp260.000 |
| 186.            | Semarang            | Kab. Temanggung           | Orang/Kali | Rp240.000 |
| 187.            | Semarang            | Kab. Wonogiri             | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 188.            | Semarang            | Kab. Wonosobo             | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 189.            | Semarang            | Kota Magelang             | Orang/Kali | Rp240.000 |
| 190.            | Semarang            | Kota Pekalongan           | Orang/Kali | Rp245.000 |
| 191.            | Semarang            | Kota Salatiga             | Orang/Kali | Rp235.000 |
| 192.            | Semarang            | Kota Surakarta            | Orang/Kali | Rp245.000 |
| 193.            | Semarang            | Kota Tegal                | Orang/Kali | Rp260.000 |
| D.I. YOGYAKARTA |                     |                           |            |           |
| 194.            | Yogyakarta          | Kab. Bantul               | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 195.            | Yogyakarta          | Kab. Gunung Kidul         | Orang/Kali | Rp350.000 |
| 196.            | Yogyakarta          | Kab. Kulon Progo          | Orang/Kali | Rp350.000 |
| 197.            | Yogyakarta          | Kab. Sleman               | Orang/Kali | Rp200.000 |
| JAWA TIMUR      |                     |                           |            |           |
| 198.            | Surabaya            | Kab. Bangkalan            | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 199.            | Surabaya            | Kab. Banyuwangi           | Orang/Kali | Rp285.000 |
| 200.            | Surabaya            | Kab. Blitar               | Orang/Kali | Rp255.000 |
| 201.            | Surabaya            | Kab. Bojonegoro           | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 202.            | Surabaya            | Kab. Bondowoso            | Orang/Kali | Rp255.000 |
| 203.            | Surabaya            | Kab. Gresik               | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 204.            | Surabaya            | Kab. Jember               | Orang/Kali | Rp261.000 |
| 205.            | Surabaya            | Kab. Jombang              | Orang/Kali | Rp235.000 |
| 206.            | Surabaya            | Kab. Kediri               | Orang/Kali | Rp235.000 |
| 207.            | Surabaya            | Kab. Lamongan             | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 208.            | Surabaya            | Kab. Lumajang             | Orang/Kali | Rp261.000 |
| 209.            | Surabaya            | Kab. Madiun               | Orang/Kali | Rp245.000 |
| 210.            | Surabaya            | Kab. Magetan              | Orang/Kali | Rp253.000 |
| 211.            | Surabaya            | Kab. Malang               | Orang/Kali | Rp228.000 |
| 212.            | Surabaya            | Kab. Mojokerto            | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 213.            | Surabaya            | Kab. Nganjuk              | Orang/Kali | Rp245.000 |
| 214.            | Surabaya            | Kab. Ngawi                | Orang/Kali | Rp253.000 |
| 215.            | Surabaya            | Kab. Pacitan              | Orang/Kali | Rp285.000 |
| 216.            | Surabaya            | Kab. Pamekasan            | Orang/Kali | Rp243.000 |
| 217.            | Surabaya            | Kab. Pasuruan             | Orang/Kali | Rp228.000 |
| 218.            | Surabaya            | Kab. Ponorogo             | Orang/Kali | Rp255.000 |
| 219.            | Surabaya            | Kab. Probolinggo          | Orang/Kali | Rp228.000 |
| 220.            | Surabaya            | Kab. Sampang              | Orang/Kali | Rp235.000 |
| 221.            | Surabaya            | Kab. Sidoarjo             | Orang/Kali | Rp240.000 |

222. Surabaya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

| NO.                 | IBUKOTA<br>PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN   |
|---------------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------|
| (1)                 | (2)                 | (3)                       | (4)        | (5)       |
| 222.                | Surabaya            | Kab. Situbondo            | Orang/Kali | Rp255.000 |
| 223.                | Surabaya            | Kab. Sumenep              | Orang/Kali | Rp255.000 |
| 224.                | Surabaya            | Kab. Trenggalek           | Orang/Kali | Rp245.000 |
| 225.                | Surabaya            | Kab. Tuban                | Orang/Kali | Rp245.000 |
| 226.                | Surabaya            | Kab. Tulungagung          | Orang/Kali | Rp245.000 |
| 227.                | Surabaya            | Kota Batu                 | Orang/Kali | Rp242.000 |
| 228.                | Surabaya            | Kota Blitar               | Orang/Kali | Rp255.000 |
| 229.                | Surabaya            | Kota Bojonegoro           | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 230.                | Surabaya            | Kota Kediri               | Orang/Kali | Rp235.000 |
| 231.                | Surabaya            | Kota Madiun               | Orang/Kali | Rp245.000 |
| 232.                | Surabaya            | Kota Malang               | Orang/Kali | Rp228.000 |
| 233.                | Surabaya            | Kota Mojokerto            | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 234.                | Surabaya            | Kota Probolinggo          | Orang/Kali | Rp228.000 |
| BALI                |                     |                           |            |           |
| 235.                | Denpasar            | Kab. Badung               | Orang/Kali | Rp188.000 |
| 236.                | Denpasar            | Kab. Bangli               | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 237.                | Denpasar            | Kab. Buleleng             | Orang/Kali | Rp265.000 |
| 238.                | Denpasar            | Kab. Gianyar              | Orang/Kali | Rp225.000 |
| 239.                | Denpasar            | Kab. Jembrana             | Orang/Kali | Rp270.000 |
| 240.                | Denpasar            | Kab. Karangasem           | Orang/Kali | Rp263.000 |
| 241.                | Denpasar            | Kab. Tabanan              | Orang/Kali | Rp225.000 |
| NUSA TENGGARA BARAT |                     |                           |            |           |
| 242.                | Mataram             | Kab. Lombok Barat         | Orang/Kali | Rp325.000 |
| 243.                | Mataram             | Kab. Lombok Tengah        | Orang/Kali | Rp450.000 |
| 244.                | Mataram             | Kab. Lombok Timur         | Orang/Kali | Rp350.000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR |                     |                           |            |           |
| 245.                | Kupang              | Kab. Belu                 | Orang/Kali | Rp325.000 |
| 246.                | Kupang              | Kab. Kupang               | Orang/Kali | Rp175.000 |
| 247.                | Kupang              | Kab. Timor Tengah Selatan | Orang/Kali | Rp218.000 |
| 248.                | Kupang              | Kab. Timor Tengah Utara   | Orang/Kali | Rp275.000 |
| KALIMANTAN BARAT    |                     |                           |            |           |
| 249.                | Pontianak           | Kab. Bengkayang           | Orang/Kali | Rp270.000 |
| 250.                | Pontianak           | Kab. Kapuas Hulu          | Orang/Kali | Rp550.000 |
| 251.                | Pontianak           | Kab. Kayong Utara         | Orang/Kali | Rp550.000 |
| 252.                | Pontianak           | Kab. Ketapang             | Orang/Kali | Rp550.000 |
| 253.                | Pontianak           | Kab. Kubu Raya            | Orang/Kali | Rp185.000 |
| 254.                | Pontianak           | Kab. Landak               | Orang/Kali | Rp270.000 |
| 255.                | Pontianak           | Kab. Melawi               | Orang/Kali | Rp430.000 |
| 256.                | Pontianak           | Kab. Mempawah             | Orang/Kali | Rp230.000 |
| 257.                | Pontianak           | Kab. Sambas               | Orang/Kali | Rp300.000 |

258. Pontianak . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

| NO.                       | IBUKOTA<br>PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN     |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|
| (1)                       | (2)                 | (3)                       | (4)        | (5)         |
| 258.                      | Pontianak           | Kab. Sanggau              | Orang/Kali | Rp303.000   |
| 259.                      | Pontianak           | Kab. Sekadau              | Orang/Kali | Rp343.000   |
| 260.                      | Pontianak           | Kab. Sintang              | Orang/Kali | Rp392.000   |
| 261.                      | Pontianak           | Kota Singkawang           | Orang/Kali | Rp257.000   |
| <b>KALIMANTAN TENGAH</b>  |                     |                           |            |             |
| 262.                      | Palangkaraya        | Kab. Barito Selatan       | Orang/Kali | Rp290.000   |
| 263.                      | Palangkaraya        | Kab. Barito Timur         | Orang/Kali | Rp333.000   |
| 264.                      | Palangkaraya        | Kab. Barito Utara         | Orang/Kali | Rp425.000   |
| 265.                      | Palangkaraya        | Kab. Gunung Mas           | Orang/Kali | Rp300.000   |
| 266.                      | Palangkaraya        | Kab. Kapuas               | Orang/Kali | Rp275.000   |
| 267.                      | Palangkaraya        | Kab. Katingan             | Orang/Kali | Rp250.000   |
| 268.                      | Palangkaraya        | Kab. Kotawaringin Barat   | Orang/Kali | Rp425.000   |
| 269.                      | Palangkaraya        | Kab. Kotawaringin Timur   | Orang/Kali | Rp300.000   |
| 270.                      | Palangkaraya        | Kab. Lamandau             | Orang/Kali | Rp525.000   |
| 271.                      | Palangkaraya        | Kab. Murung Raya          | Orang/Kali | Rp448.000   |
| 272.                      | Palangkaraya        | Kab. Pulau Pisau          | Orang/Kali | Rp250.000   |
| 273.                      | Palangkaraya        | Kab. Seruyan              | Orang/Kali | Rp328.000   |
| 274.                      | Palangkaraya        | Kab. Sukamara             | Orang/Kali | Rp525.000   |
| <b>KALIMANTAN SELATAN</b> |                     |                           |            |             |
| 275.                      | Banjarmasin         | Kab. Balangan             | Orang/Kali | Rp230.000   |
| 276.                      | Banjarmasin         | Kab. Banjar               | Orang/Kali | Rp170.000   |
| 277.                      | Banjarmasin         | Kab. Barito Kuala         | Orang/Kali | Rp200.000   |
| 278.                      | Banjarmasin         | Kab. Hulu Sungai Selatan  | Orang/Kali | Rp200.000   |
| 279.                      | Banjarmasin         | Kab. Hulu Sungai Tengah   | Orang/Kali | Rp212.000   |
| 280.                      | Banjarmasin         | Kab. Hulu Sungai Utara    | Orang/Kali | Rp218.000   |
| 281.                      | Banjarmasin         | Kab. Kota Baru            | Orang/Kali | Rp290.000   |
| 282.                      | Banjarmasin         | Kab. Tabalong             | Orang/Kali | Rp234.000   |
| 283.                      | Banjarmasin         | Kab. Tanah Bumbu          | Orang/Kali | Rp300.000   |
| 284.                      | Banjarmasin         | Kab. Tanah Laut           | Orang/Kali | Rp200.000   |
| 285.                      | Banjarmasin         | Kab. Tapin                | Orang/Kali | Rp189.000   |
| 286.                      | Banjarmasin         | Kota Banjarbaru           | Orang/Kali | Rp225.000   |
| <b>KALIMANTAN TIMUR</b>   |                     |                           |            |             |
| 287.                      | Samarinda           | Kab. Kutai Barat          | Orang/Kali | Rp1.500.000 |
| 288.                      | Samarinda           | Kab. Kutai Kartanegara    | Orang/Kali | Rp500.000   |
| 289.                      | Samarinda           | Kab. Kutai Timur          | Orang/Kali | Rp1.350.000 |
| 290.                      | Samarinda           | Kab. Paser                | Orang/Kali | Rp1.650.000 |
| 291.                      | Samarinda           | Kab. Penajam Paser Utara  | Orang/Kali | Rp650.000   |
| 292.                      | Samarinda           | Kota Balikpapan           | Orang/Kali | Rp550.000   |
| 293.                      | Samarinda           | Kota Bontang              | Orang/Kali | Rp600.000   |

SULAWESI UTARA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

| NO.                     | IBUKOTA<br>PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN      | SATUAN     | BESARAN   |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| (1)                     | (2)                 | (3)                            | (4)        | (5)       |
| <b>SULAWESI UTARA</b>   |                     |                                |            |           |
| 294.                    | Manado              | Kab. Bolaang Mongondow         | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 295.                    | Manado              | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Orang/Kali | Rp275.000 |
| 296.                    | Manado              | Kab. Bolaang Mongondow Timur   | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 297.                    | Manado              | Kab. Bolaang Mongondow Utara   | Orang/Kali | Rp300.000 |
| 298.                    | Manado              | Kab. Minahasa                  | Orang/Kali | Rp180.000 |
| 299.                    | Manado              | Kab. Minahasa Selatan          | Orang/Kali | Rp180.000 |
| 300.                    | Manado              | Kab. Minahasa Tenggara         | Orang/Kali | Rp200.000 |
| 301.                    | Manado              | Kab. Minahasa Utara            | Orang/Kali | Rp175.000 |
| 302.                    | Manado              | Kota Bitung                    | Orang/Kali | Rp175.000 |
| 303.                    | Manado              | Kota Kotamobagu                | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 304.                    | Manado              | Kota Tomohon                   | Orang/Kali | Rp170.000 |
| <b>GORONTALO</b>        |                     |                                |            |           |
| 305.                    | Gorontalo           | Kab. Boalemo                   | Orang/Kali | Rp400.000 |
| 306.                    | Gorontalo           | Kab. Gorontalo                 | Orang/Kali | Rp300.000 |
| 307.                    | Gorontalo           | Kab. Gorontalo Utara           | Orang/Kali | Rp350.000 |
| 308.                    | Gorontalo           | Kab. Pahuwato                  | Orang/Kali | Rp650.000 |
| <b>SULAWESI BARAT</b>   |                     |                                |            |           |
| 309.                    | Mamuju              | Kab. Majene                    | Orang/Kali | Rp240.000 |
| 310.                    | Mamuju              | Kab. Mamasa                    | Orang/Kali | Rp359.000 |
| 311.                    | Mamuju              | Kab. Mamuju Tengah             | Orang/Kali | Rp200.000 |
| 312.                    | Mamuju              | Kab. Pasangkayu                | Orang/Kali | Rp270.000 |
| 313.                    | Mamuju              | Kab. Polewali Mandar           | Orang/Kali | Rp260.000 |
| <b>SULAWESI SELATAN</b> |                     |                                |            |           |
| 314.                    | Makassar            | Kab. Bantaeng                  | Orang/Kali | Rp235.000 |
| 315.                    | Makassar            | Kab. Barru                     | Orang/Kali | Rp210.000 |
| 316.                    | Makassar            | Kab. Bone                      | Orang/Kali | Rp240.000 |
| 317.                    | Makassar            | Kab. Bulukumba                 | Orang/Kali | Rp240.000 |
| 318.                    | Makassar            | Kab. Enrekang                  | Orang/Kali | Rp250.000 |
| 319.                    | Makassar            | Kab. Gowa                      | Orang/Kali | Rp175.000 |
| 320.                    | Makassar            | Kab. Jeneponto                 | Orang/Kali | Rp230.000 |
| 321.                    | Makassar            | Kab. Luwu                      | Orang/Kali | Rp350.000 |
| 322.                    | Makassar            | Kab. Luwu Timur                | Orang/Kali | Rp375.000 |
| 323.                    | Makassar            | Kab. Luwu Utara                | Orang/Kali | Rp365.000 |
| 324.                    | Makassar            | Kab. Maros                     | Orang/Kali | Rp170.000 |
| 325.                    | Makassar            | Kab. Pinrang                   | Orang/Kali | Rp230.000 |
| 326.                    | Makassar            | Kab. Sidenreng Rappang         | Orang/Kali | Rp230.000 |
| 327.                    | Makassar            | Kab. Sinjai                    | Orang/Kali | Rp235.000 |
| 328.                    | Makassar            | Kab. Soppeng                   | Orang/Kali | Rp235.000 |
| 329.                    | Makassar            | Kab. Takalar                   | Orang/Kali | Rp190.000 |

330. Makassar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

| NO.               | IBUKOTA<br>PROVINSI | KABUPATEN/<br>KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN     |
|-------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|
| (1)               | (2)                 | (3)                       | (4)        | (5)         |
| 330.              | Makassar            | Kab. Tana Toraja          | Orang/Kali | Rp350.000   |
| 331.              | Makassar            | Kab. Toraja Utara         | Orang/Kali | Rp350.000   |
| 332.              | Makassar            | Kab. Wajo                 | Orang/Kali | Rp230.000   |
| 333.              | Makassar            | Kota Palopo               | Orang/Kali | Rp350.000   |
| 334.              | Makassar            | Kota Pare-Pare            | Orang/Kali | Rp225.000   |
| SULAWESI TENGAH   |                     |                           |            |             |
| 335.              | Palu                | Kab. Luwuk                | Orang/Kali | Rp400.000   |
| 336.              | Palu                | Kab. Buol                 | Orang/Kali | Rp472.000   |
| 337.              | Palu                | Kab. Donggala             | Orang/Kali | Rp130.000   |
| 338.              | Palu                | Kab. Morowali             | Orang/Kali | Rp400.000   |
| 339.              | Palu                | Kab. Morowali Utara       | Orang/Kali | Rp400.000   |
| 340.              | Palu                | Kab. Parigi Moutong       | Orang/Kali | Rp250.000   |
| 341.              | Palu                | Kab. Poso                 | Orang/Kali | Rp280.000   |
| 342.              | Palu                | Kab. Sigi                 | Orang/Kali | Rp219.000   |
| 343.              | Palu                | Kab. Tojo Una-Una         | Orang/Kali | Rp350.000   |
| 344.              | Palu                | Kab. Toli-Toli            | Orang/Kali | Rp412.000   |
| SULAWESI TENGGARA |                     |                           |            |             |
| 345.              | Kendari             | Kab. Bombana              | Orang/Kali | Rp355.000   |
| 346.              | Kendari             | Kab. Kolaka               | Orang/Kali | Rp370.000   |
| 347.              | Kendari             | Kab. Kolaka Timur         | Orang/Kali | Rp300.000   |
| 348.              | Kendari             | Kab. Kolaka Utara         | Orang/Kali | Rp425.000   |
| 349.              | Kendari             | Kab. Konawe               | Orang/Kali | Rp300.000   |
| 350.              | Kendari             | Kab. Konawe Selatan       | Orang/Kali | Rp305.000   |
| 351.              | Kendari             | Kab. Konawe Utara         | Orang/Kali | Rp300.000   |
| MALUKU UTARA      |                     |                           |            |             |
| 352.              | Sofifi              | Kab. Halmahera Barat      | Orang/Kali | Rp850.000   |
| 353.              | Sofifi              | Kab. Halmahera Tengah     | Orang/Kali | Rp1.000.000 |
| 354.              | Sofifi              | Kab. Halmahera Timur      | Orang/Kali | Rp1.250.000 |
| 355.              | Sofifi              | Kab. Halmahera Utara      | Orang/Kali | Rp900.000   |
| PAPUA             |                     |                           |            |             |
| 356.              | Jayapura            | Kab. Jayapura             | Orang/Kali | Rp600.000   |
| 357.              | Jayapura            | Kab. Keerom               | Orang/Kali | Rp900.000   |
| 358.              | Jayapura            | Kab. Sarmi                | Orang/Kali | Rp2.700.000 |
| PAPUA BARAT       |                     |                           |            |             |
| 359.              | Manokwari           | Kab. Teluk Bintuni        | Orang/Kali | Rp900.000   |
| 360.              | Manokwari           | Kab. Manokwari Selatan    | Orang/Kali | Rp750.000   |
| 361.              | Manokwari           | Kab. Pegunungan Arfak     | Orang/Kali | Rp2.650.000 |

2.4. SATUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

**2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI JAKARTA KE  
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)**

Satuan biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Kepala Daerah dapat menetapkan standar biaya transportasi darat/transportasi laut untuk rute atau tujuan antar provinsi/antar kabupaten kota melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.5.

**TABEL 2.5**  
**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI JAKARTA**  
**KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)**

| NO. | IBUKOTA<br>PROVINSI | KABUPATEN/KOTA<br>TUJUAN | SATUAN     | BESARAN   |
|-----|---------------------|--------------------------|------------|-----------|
| (1) | (2)                 | (3)                      | (4)        | (5)       |
| 1.  | Jakarta             | Kota Bekasi              | Orang/Kali | Rp284.000 |
| 2.  | Jakarta             | Kab. Bekasi              | Orang/Kali | Rp284.000 |
| 3.  | Jakarta             | Kab. Bogor               | Orang/Kali | Rp300.000 |
| 4.  | Jakarta             | Kota Bogor               | Orang/Kali | Rp300.000 |
| 5.  | Jakarta             | Kota Depok               | Orang/Kali | Rp275.000 |
| 6.  | Jakarta             | Kota Tangerang           | Orang/Kali | Rp286.000 |
| 7.  | Jakarta             | Kota Tangerang Selatan   | Orang/Kali | Rp286.000 |
| 8.  | Jakarta             | Kab. Tangerang           | Orang/Kali | Rp310.000 |
| 9.  | Jakarta             | Kepulauan Seribu         | Orang/Kali | Rp428.000 |

3. SATUAN. . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

**3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT**

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

**TABEL 2.6  
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT**

| NO. | PROVINSI                                                      | SATUAN     | MAKAN     | KUDAPAN<br>(SNACK) |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|
| (1) | (2)                                                           | (3)        | (4)       | (5)                |
| 1.  | RAPAT KOORDINASI TINGKAT<br>KEPALA DAERAH/<br>ESELON I/SETARA | Orang/Kali | Rp110.000 | Rp49.000           |
| 2.  | RAPAT BIASA                                                   |            |           |                    |
|     | 2.1 ACEH                                                      | Orang/Kali | Rp51.000  | Rp20.000           |
|     | 2.2 SUMATERA UTARA                                            | Orang/Kali | Rp47.000  | Rp17.000           |
|     | 2.3 RIAU                                                      | Orang/Kali | Rp50.000  | Rp17.000           |
|     | 2.4 KEPULAUAN RIAU                                            | Orang/Kali | Rp44.000  | Rp25.000           |
|     | 2.5 JAMBI                                                     | Orang/Kali | Rp50.000  | Rp18.000           |
|     | 2.6 SUMATERA BARAT                                            | Orang/Kali | Rp45.000  | Rp18.000           |
|     | 2.7 SUMATERA SELATAN                                          | Orang/Kali | Rp63.000  | Rp18.000           |
|     | 2.8 LAMPUNG                                                   | Orang/Kali | Rp43.000  | Rp21.000           |
|     | 2.9 BENGKULU                                                  | Orang/Kali | Rp48.000  | Rp16.000           |
|     | 2.10 BANGKA BELITUNG                                          | Orang/Kali | Rp44.000  | Rp19.000           |
|     | 2.11 BANTEN                                                   | Orang/Kali | Rp54.000  | Rp20.000           |
|     | 2.12 JAWA BARAT                                               | Orang/Kali | Rp50.000  | Rp21.000           |
|     | 2.13 DKI JAKARTA                                              | Orang/Kali | Rp53.000  | Rp24.000           |
|     | 2.14 JAWA TENGAH                                              | Orang/Kali | Rp68.750  | Rp16.000           |
|     | 2.15 D.I. YOGYAKARTA                                          | Orang/Kali | Rp55.000  | Rp16.000           |
|     | 2.16 JAWA TIMUR                                               | Orang/Kali | Rp49.000  | Rp23.000           |
|     | 2.17 BALI                                                     | Orang/Kali | Rp48.000  | Rp21.000           |
|     | 2.18 NUSA TENGGARA BARAT                                      | Orang/Kali | Rp49.000  | Rp18.000           |
|     | 2.19 NUSA TENGGARA TIMUR                                      | Orang/Kali | Rp52.000  | Rp22.000           |

2.20 KALIMANTAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

| NO. | PROVINSI                | SATUAN     | MAKAN    | KUDAPAN<br>(SNACK) |
|-----|-------------------------|------------|----------|--------------------|
| (1) | (2)                     | (3)        | (4)      | (5)                |
|     | 2.20 KALIMANTAN BARAT   | Orang/Kali | Rp51.000 | Rp17.000           |
|     | 2.21 KALIMANTAN TENGAH  | Orang/Kali | Rp42.000 | Rp15.000           |
|     | 2.22 KALIMANTAN SELATAN | Orang/Kali | Rp51.000 | Rp17.000           |
|     | 2.23 KALIMANTAN TIMUR   | Orang/Kali | Rp48.000 | Rp26.000           |
|     | 2.24 KALIMANTAN UTARA   | Orang/Kali | Rp53.000 | Rp21.000           |
|     | 2.25 SULAWESI UTARA     | Orang/Kali | Rp55.000 | Rp26.000           |
|     | 2.26 GORONTALO          | Orang/Kali | Rp45.000 | Rp15.000           |
|     | 2.27 SULAWESI BARAT     | Orang/Kali | Rp54.000 | Rp21.000           |
|     | 2.28 SULAWESI SELATAN   | Orang/Kali | Rp56.000 | Rp26.000           |
|     | 2.29 SULAWESI TENGAH    | Orang/Kali | Rp48.000 | Rp18.000           |
|     | 2.30 SULAWESI TENGGARA  | Orang/Kali | Rp49.000 | Rp21.000           |
|     | 2.31 MALUKU             | Orang/Kali | Rp59.000 | Rp24.000           |
|     | 2.32 MALUKU UTARA       | Orang/Kali | Rp63.000 | Rp25.000           |
|     | 2.33 PAPUA              | Orang/Kali | Rp61.000 | Rp33.000           |
|     | 2.34 PAPUA BARAT        | Orang/Kali | Rp62.000 | Rp27.000           |
|     | 2.35 PAPUA BARAT DAYA   | Orang/Kali | Rp62.000 | Rp27.000           |
|     | 2.36 PAPUA TENGAH       | Orang/Kali | Rp61.000 | Rp33.000           |
|     | 2.37 PAPUA SELATAN      | Orang/Kali | Rp90.000 | Rp49.000           |
|     | 2.38 PAPUA PEGUNUNGAN   | Orang/Kali | Rp91.000 | Rp40.000           |

**4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN**

**4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI**

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7.

**TABEL 2.7  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG  
ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI**

| NO. | PROVINSI            | SATUAN                | GEDUNG BERTINGKAT | GEDUNG TIDAK BERTINGKAT | HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR |
|-----|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)                   | (4)               | (5)                     | (6)                             |
| 1.  | ACEH                | m <sup>2</sup> /tahun | Rp192.000         | Rp148.000               | Rp10.000                        |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | m <sup>2</sup> /tahun | Rp229.000         | Rp171.000               | Rp10.000                        |
| 3.  | RIAU                | m <sup>2</sup> /tahun | Rp217.000         | Rp162.000               | Rp11.000                        |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | m <sup>2</sup> /tahun | Rp244.000         | Rp182.000               | Rp11.000                        |
| 5.  | JAMBI               | m <sup>2</sup> /tahun | Rp204.000         | Rp151.000               | Rp10.000                        |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | m <sup>2</sup> /tahun | Rp182.000         | Rp132.000               | Rp10.000                        |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | m <sup>2</sup> /tahun | Rp218.000         | Rp147.000               | Rp11.000                        |
| 8.  | LAMPUNG             | m <sup>2</sup> /tahun | Rp214.000         | Rp136.000               | Rp10.000                        |
| 9.  | BENGKULU            | m <sup>2</sup> /tahun | Rp191.000         | Rp131.000               | Rp10.000                        |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | m <sup>2</sup> /tahun | Rp215.000         | Rp141.000               | Rp11.000                        |
| 11. | BANTEN              | m <sup>2</sup> /tahun | Rp202.000         | Rp144.000               | Rp10.000                        |
| 12. | JAWA BARAT          | m <sup>2</sup> /tahun | Rp178.000         | Rp141.000               | Rp10.000                        |
| 13. | DKI JAKARTA         | m <sup>2</sup> /tahun | Rp206.000         | Rp157.000               | Rp11.000                        |
| 14. | JAWA TENGAH         | m <sup>2</sup> /tahun | Rp173.000         | Rp97.000                | Rp10.000                        |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | m <sup>2</sup> /tahun | Rp168.000         | Rp111.000               | Rp10.000                        |
| 16. | JAWA TIMUR          | m <sup>2</sup> /tahun | Rp196.000         | Rp170.000               | Rp10.000                        |
| 17. | BALI                | m <sup>2</sup> /tahun | Rp200.000         | Rp148.000               | Rp10.000                        |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | m <sup>2</sup> /tahun | Rp223.000         | Rp185.000               | Rp10.000                        |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | m <sup>2</sup> /tahun | Rp197.000         | Rp160.000               | Rp10.000                        |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | m <sup>2</sup> /tahun | Rp201.000         | Rp136.000               | Rp10.000                        |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | m <sup>2</sup> /tahun | Rp236.000         | Rp155.000               | Rp11.000                        |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | m <sup>2</sup> /tahun | Rp196.000         | Rp148.000               | Rp11.000                        |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | m <sup>2</sup> /tahun | Rp242.000         | Rp200.000               | Rp10.000                        |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | m <sup>2</sup> /tahun | Rp242.000         | Rp200.000               | Rp10.000                        |
| 25. | SULAWESI UTARA      | m <sup>2</sup> /tahun | Rp187.000         | Rp157.000               | Rp10.000                        |
| 26. | GORONTALO           | m <sup>2</sup> /tahun | Rp196.000         | Rp138.000               | Rp14.000                        |
| 27. | SULAWESI BARAT      | m <sup>2</sup> /tahun | Rp356.000         | Rp296.000               | Rp11.000                        |

28. SULAWESI . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-29 -

| NO. | PROVINSI          | SATUAN                | GEDUNG<br>BERTINGKAT | GEDUNG TIDAK<br>BERTINGKAT | HALAMAN<br>GEDUNG/<br>BANGUNAN<br>KANTOR |
|-----|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                   | (4)                  | (5)                        | (6)                                      |
| 28. | SULAWESI SELATAN  | m <sup>2</sup> /tahun | Rp209.000            | Rp190.000                  | Rp10.000                                 |
| 29. | SULAWESI TENGAH   | m <sup>2</sup> /tahun | Rp226.000            | Rp168.000                  | Rp11.000                                 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA | m <sup>2</sup> /tahun | Rp197.000            | Rp144.000                  | Rp10.000                                 |
| 31. | MALUKU            | m <sup>2</sup> /tahun | Rp223.000            | Rp197.000                  | Rp14.000                                 |
| 32. | MALUKU UTARA      | m <sup>2</sup> /tahun | Rp229.000            | Rp192.000                  | Rp14.000                                 |
| 33. | PAPUA             | m <sup>2</sup> /tahun | Rp487.000            | Rp277.000                  | Rp14.000                                 |
| 34. | PAPUA BARAT       | m <sup>2</sup> /tahun | Rp632.000            | Rp469.000                  | Rp19.000                                 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA  | m <sup>2</sup> /tahun | Rp632.000            | Rp469.000                  | Rp19.000                                 |
| 36. | PAPUA TENGAH      | m <sup>2</sup> /tahun | Rp487.000            | Rp277.000                  | Rp14.000                                 |
| 37. | PAPUA SELATAN     | m <sup>2</sup> /tahun | Rp716.000            | Rp407.000                  | Rp21.000                                 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN  | m <sup>2</sup> /tahun | Rp721.000            | Rp410.000                  | Rp21.000                                 |

**4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS**

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, Tabel 2.10, dan Tabel 2.11.

TABEL 2.8 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

**TABEL 2.8**  
**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT**

| NO. | PROVINSI                 | SATUAN     | BESARAN      |
|-----|--------------------------|------------|--------------|
| (1) | (2)                      | (3)        | (4)          |
| I   | KEPALA DAERAH/KETUA DPRD | Unit/Tahun | Rp45.670.000 |
| II  | ANGGOTA DPRD             | Unit/Tahun | Rp44.010.000 |
| III | PEJABAT ESELON I         | Unit/Tahun | Rp42.350.000 |
| IV  | PEJABAT ESELON II        |            |              |
| 1.  | ACEH                     | Unit/Tahun | Rp43.610.000 |
| 2.  | SUMATERA UTARA           | Unit/Tahun | Rp42.180.000 |
| 3.  | RIAU                     | Unit/Tahun | Rp42.290.000 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU           | Unit/Tahun | Rp42.040.000 |
| 5.  | JAMBI                    | Unit/Tahun | Rp43.000.000 |
| 6.  | SUMATERA BARAT           | Unit/Tahun | Rp42.950.000 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN         | Unit/Tahun | Rp42.310.000 |
| 8.  | LAMPUNG                  | Unit/Tahun | Rp42.430.000 |
| 9.  | BENGKULU                 | Unit/Tahun | Rp42.340.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG          | Unit/Tahun | Rp42.010.000 |
| 11. | BANTEN                   | Unit/Tahun | Rp42.180.000 |
| 12. | JAWA BARAT               | Unit/Tahun | Rp42.090.000 |
| 13. | DKI JAKARTA              | Unit/Tahun | Rp42.490.000 |
| 14. | JAWA TENGAH              | Unit/Tahun | Rp43.960.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA          | Unit/Tahun | Rp43.710.000 |
| 16. | JAWA TIMUR               | Unit/Tahun | Rp42.370.000 |
| 17. | BALI                     | Unit/Tahun | Rp44.300.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT      | Unit/Tahun | Rp42.860.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR      | Unit/Tahun | Rp41.740.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT         | Unit/Tahun | Rp42.510.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH        | Unit/Tahun | Rp44.280.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN       | Unit/Tahun | Rp42.750.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR         | Unit/Tahun | Rp42.320.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA         | Unit/Tahun | Rp42.320.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA           | Unit/Tahun | Rp42.240.000 |
| 26. | GORONTALO                | Unit/Tahun | Rp41.920.000 |
| 27. | SULAWESI BARAT           | Unit/Tahun | Rp40.940.000 |
| 28. | SULAWESI SELATAN         | Unit/Tahun | Rp42.130.000 |
| 29. | SULAWESI TENGAH          | Unit/Tahun | Rp42.810.000 |

30. SULAWESI . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

| NO. | PROVINSI          | SATUAN     | BESARAN      |
|-----|-------------------|------------|--------------|
| (1) | (2)               | (3)        | (4)          |
| 30. | SULAWESI TENGGARA | Unit/Tahun | Rp43.310.000 |
| 31. | MALUKU            | Unit/Tahun | Rp42.900.000 |
| 32. | MALUKU UTARA      | Unit/Tahun | Rp41.990.000 |
| 33. | PAPUA             | Unit/Tahun | Rp42.530.000 |
| 34. | PAPUA BARAT       | Unit/Tahun | Rp42.600.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA  | Unit/Tahun | Rp42.600.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH      | Unit/Tahun | Rp42.530.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN     | Unit/Tahun | Rp42.530.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN  | Unit/Tahun | Rp42.530.000 |

**TABEL 2.9**

**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

| NO. | PROVINSI            | SATUAN     | RODA EMPAT   | DOUBLE<br>GARDAN | RODA DUA    |
|-----|---------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| (1) | (2)                 | (3)        | (4)          | (5)              | (6)         |
| 1.  | ACEH                | Unit/Tahun | Rp37.970.000 | Rp40.990.000     | Rp5.250.000 |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | Unit/Tahun | Rp36.820.000 | Rp39.410.000     | Rp5.020.000 |
| 3.  | RIAU                | Unit/Tahun | Rp36.900.000 | Rp39.550.000     | Rp4.990.000 |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | Unit/Tahun | Rp36.990.000 | Rp39.270.000     | Rp4.890.000 |
| 5.  | JAMBI               | Unit/Tahun | Rp37.480.000 | Rp40.310.000     | Rp5.130.000 |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | Unit/Tahun | Rp37.440.000 | Rp40.280.000     | Rp5.170.000 |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | Unit/Tahun | Rp36.920.000 | Rp39.540.000     | Rp4.990.000 |
| 8.  | LAMPUNG             | Unit/Tahun | Rp37.020.000 | Rp39.670.000     | Rp5.020.000 |
| 9.  | BENGKULU            | Unit/Tahun | Rp36.940.000 | Rp39.570.000     | Rp5.000.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | Unit/Tahun | Rp36.680.000 | Rp39.210.000     | Rp4.930.000 |
| 11. | BANTEN              | Unit/Tahun | Rp36.760.000 | Rp39.430.000     | Rp4.900.000 |
| 12. | JAWA BARAT          | Unit/Tahun | Rp36.690.000 | Rp39.340.000     | Rp4.880.000 |
| 13. | DKI JAKARTA         | Unit/Tahun | Rp37.000.000 | Rp39.790.000     | Rp4.960.000 |
| 14. | JAWA TENGAH         | Unit/Tahun | Rp38.220.000 | Rp41.400.000     | Rp5.270.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA     | Unit/Tahun | Rp38.020.000 | Rp41.120.000     | Rp5.230.000 |
| 16. | JAWA TIMUR          | Unit/Tahun | Rp36.940.000 | Rp39.630.000     | Rp4.970.000 |
| 17. | BALI                | Unit/Tahun | Rp38.560.000 | Rp41.740.000     | Rp5.430.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | Unit/Tahun | Rp37.400.000 | Rp40.150.000     | Rp5.130.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | Unit/Tahun | Rp36.490.000 | Rp38.900.000     | Rp4.900.000 |

20. KALIMANTAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

| NO. | PROVINSI           | SATUAN     | RODA EMPAT   | DOUBLE<br>GARDAN | RODA DUA    |
|-----|--------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| (1) | (2)                | (3)        | (4)          | (5)              | (6)         |
| 20. | KALIMANTAN BARAT   | Unit/Tahun | Rp37.510.000 | Rp39.700.000     | Rp5.080.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH  | Unit/Tahun | Rp39.050.000 | Rp41.640.000     | Rp5.470.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | Unit/Tahun | Rp37.720.000 | Rp39.970.000     | Rp5.120.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR   | Unit/Tahun | Rp37.360.000 | Rp39.480.000     | Rp5.020.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA   | Unit/Tahun | Rp37.360.000 | Rp39.480.000     | Rp3.620.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA     | Unit/Tahun | Rp37.270.000 | Rp39.410.000     | Rp5.030.000 |
| 26. | GORONTALO          | Unit/Tahun | Rp37.010.000 | Rp39.030.000     | Rp4.990.000 |
| 27. | SULAWESI BARAT     | Unit/Tahun | Rp35.810.000 | Rp38.040.000     | Rp4.680.000 |
| 28. | SULAWESI SELATAN   | Unit/Tahun | Rp36.770.000 | Rp39.360.000     | Rp4.910.000 |
| 29. | SULAWESI TENGAH    | Unit/Tahun | Rp37.790.000 | Rp40.010.000     | Rp5.160.000 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA  | Unit/Tahun | Rp38.220.000 | Rp40.550.000     | Rp5.260.000 |
| 31. | MALUKU             | Unit/Tahun | Rp37.900.000 | Rp40.080.000     | Rp5.260.000 |
| 32. | MALUKU UTARA       | Unit/Tahun | Rp37.100.000 | Rp39.090.000     | Rp5.080.000 |
| 33. | PAPUA              | Unit/Tahun | Rp37.600.000 | Rp39.660.000     | Rp5.320.000 |
| 34. | PAPUA BARAT        | Unit/Tahun | Rp37.650.000 | Rp39.740.000     | Rp5.240.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA   | Unit/Tahun | Rp37.650.000 | Rp39.740.000     | Rp5.240.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH       | Unit/Tahun | Rp37.600.000 | Rp39.660.000     | Rp5.320.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN      | Unit/Tahun | Rp37.600.000 | Rp39.660.000     | Rp5.320.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN   | Unit/Tahun | Rp37.600.000 | Rp39.660.000     | Rp5.320.000 |

TABEL 2.10  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS  
OPERASIONAL RODA 6 DAN *SPEED BOAT*

| NO. | URAIAN            | SATUAN     | BESARAN      |
|-----|-------------------|------------|--------------|
| (1) | (2)               | (3)        | (4)          |
| 1.  | Roda 6            | Unit/Tahun | Rp37.110.000 |
| 2.  | <i>Speed boat</i> | Unit/Tahun | Rp20.240.000 |

TABEL 2.11 . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

TABEL 2.11  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS  
LISTRIK BERBASIS BATERAI

| NO. | URAIAN                       | SATUAN     | BESARAN      |
|-----|------------------------------|------------|--------------|
| (1) | (2)                          | (3)        | (4)          |
| 1.  | Pejabat Eselon I             | Unit/Tahun | Rp11.100.000 |
| 2.  | Pejabat Eselon II            | Unit/Tahun | Rp10.990.000 |
| 3.  | Kendaraan Operasional Kantor | Unit/Tahun | Rp10.460.000 |
| 4.  | Kendaraan Roda Dua           | Unit/Tahun | Rp3.200.000  |

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, printer, *AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.12.

TABEL 2.12  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

| NO  | URAIAN                                | SATUAN        | BESARAN      |
|-----|---------------------------------------|---------------|--------------|
| (1) | (2)                                   | (3)           | (4)          |
| 1.  | Inventaris Kantor                     | Pegawai/Tahun | Rp80.000     |
| 2.  | <i>Personal Computer/Notebook</i>     | Unit/Tahun    | Rp730.000    |
| 3.  | <i>Printer</i>                        | Unit/Tahun    | Rp690.000    |
| 4.  | <i>AC Split</i>                       | Unit/Tahun    | Rp610.000    |
| 5.  | <i>Genset</i> lebih kecil dari 50 KVA | Unit/Tahun    | Rp7.190.000  |
| 6.  | <i>Genset</i> 75 KVA                  | Unit/Tahun    | Rp8.640.000  |
| 7.  | <i>Genset</i> 100 KVA                 | Unit/Tahun    | Rp10.150.000 |
| 8.  | <i>Genset</i> 125 KVA                 | Unit/Tahun    | Rp10.780.000 |
| 9.  | <i>Genset</i> 150 KVA                 | Unit/Tahun    | Rp13.260.000 |
| 10. | <i>Genset</i> 175 KVA                 | Unit/Tahun    | Rp14.810.000 |

11. *Genset* . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

| NO  | URAIAN         | SATUAN     | BESARAN      |
|-----|----------------|------------|--------------|
| (1) | (2)            | (3)        | (4)          |
| 11. | Genset 200 KVA | Unit/Tahun | Rp15.850.000 |
| 12. | Genset 250 KVA | Unit/Tahun | Rp16.790.000 |
| 13. | Genset 275 KVA | Unit/Tahun | Rp17.760.000 |
| 14. | Genset 300 KVA | Unit/Tahun | Rp20.960.000 |
| 15. | Genset 350 KVA | Unit/Tahun | Rp22.960.000 |
| 16. | Genset 450 KVA | Unit/Tahun | Rp25.620.000 |
| 17. | Genset 500 KVA | Unit/Tahun | Rp31.770.000 |

**Keterangan:**

- OJ : Orang/Jam  
OH : Orang/Hari  
OB : Orang/Bulan  
OP : Orang/Paket  
OK : Orang/Kegiatan  
Oter : Orang/Terbitan  
OJP : Orang/Jam Pelajaran

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Signature]*  
Lydia Silviana Djaman